

**KEBIJAKAN TURKI DALAM MENGESAHKAN IZIN KERJA
TERHADAP PENGUNSI SURIAH TAHUN 2016**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

PANGLIMA MORIHICIO BINTANA

20323262

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**KEBIJAKAN TURKI DALAM MENGESAHKAN IZIN KERJA
TERHADAP PENGUNSI SURIAH TAHUN 2016
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

PANGLIMA MORIHCIO BINTANA

20323262

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Kebijakan Turki Dalam Mengesahkan Izin Kerja Terhadap Pengungsi

Suriah Tahun 2016

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
05 Maret 2025

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A..
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

Masitoh
Enggar
Hasbi

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Kamis, 13 Februari 2025



Panglima Morihcio Bintana

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian	18
BAB 2 MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK DAN KEBIJAKAN IZIN KERJA 2016	21
2.1. Problem Stream: Krisis Pengungsi Suriah di Turki	21
2.1.1 Indikator	31
2.1.2 Event	32
2.1.3 Feedback.....	32
2.2 Policy Stream: Solusi Potensial untuk Pekerjaan Pengungsi.....	34
2.3 Political Stream: Faktor Politik yang Memengaruhi Keputusan	44
2.3.1 National Mood	56
2.3.2 Organized Political Forces	58
2.3.3 Bargaining.....	60
2.3.4 Bandwagons	61
BAB 3 KONVERGENSI ALIRAN DAN KEBIJAKAN IZIN KERJA 2016.....	63
3.1 Pengenalan Masalah dan Window Policy.....	63
3.2 Proses Pembuatan Keputusan	69
3.3 Konten Undang – Undang Izin Kerja 2016.....	78
BAB 4 KESIMPULAN	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Rekomendasi.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Krisis Suriah yang dimulai pada tahun 2011 menyebabkan gelombang pengungsi besar-besaran ke Turki, menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks. Secara rinci penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pergeseran kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Turki, dari pendekatan kebijakan pintu terbuka menjadi penerapan Undang-Undang Izin Kerja bagi pengungsi Suriah pada tahun 2016 sebagai upaya untuk mengintegrasikan mereka ke dalam ekonomi formal. Sebagai respons awal, pemerintah Turki menerapkan kebijakan *open door policy*, yang memungkinkan para pengungsi memasuki negara tersebut tanpa hambatan. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi, muncul berbagai permasalahan seperti tekanan terhadap pasar tenaga kerja, meningkatnya persaingan dalam sektor informal, serta ketegangan sosial antara warga lokal dan pengungsi. Dalam konteks ini, pemerintah Turki mengesahkan Undang-Undang Izin Kerja bagi pengungsi Suriah pada tahun 2016 sebagai upaya integrasi mereka ke dalam ekonomi formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Turki memutuskan untuk mengesahkan Undang-Undang Izin Kerja bagi pengungsi Suriah dengan menggunakan kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF). Secara khusus, penelitian ini berusaha menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi pengungsi serta mengkaji dinamika kebijakan izin kerja yang terbentuk dari konvergensi tiga aliran dalam MSF, yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai laporan kebijakan, dokumen resmi pemerintah, publikasi akademik, dan sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan periode 2011 hingga 2016. Analisis dilakukan dengan menelusuri faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lahirnya kebijakan izin kerja serta dinamika politik dan ekonomi yang memengaruhi proses pengesahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah merupakan respons strategis terhadap tantangan yang muncul akibat peningkatan jumlah pengungsi. Dalam kerangka MSF, *problem stream* mencakup ketegangan sosial-ekonomi serta keterbatasan akses layanan publik bagi pengungsi. *Policy stream* ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Izin Kerja sebagai solusi integratif, sedangkan *political stream* mencerminkan dukungan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) serta tekanan internasional, terutama dari Uni Eropa. Kebijakan ini dirancang untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam pasar kerja formal dengan regulasi tertentu seperti kuota pekerja, pembatasan geografis, dan pengaturan sektor kerja. Pemerintah Turki, bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan ILO, terus berupaya mengatasi hambatan implementasi melalui program pelatihan keterampilan dan kampanye kesadaran publik. Studi ini memberikan wawasan bagi negara-negara lain dalam merancang kebijakan inklusif yang dapat mendukung integrasi pengungsi ke dalam masyarakat secara berkelanjutan.

Kata-kata kunci: Pengungsi, Suriah, Turki, Kebijakan, Kerja.

ABSTRACT

The Syrian crisis that began in 2011 caused a massive influx of refugees to Turkey, creating complex social and economic challenges. In detail, this study aims to analyze the problems of the policy shift implemented by the Turkish government, from an open-door policy approach to the implementation of the Work Permit Law for Syrian refugees in 2016 as an effort to integrate them into the formal economy. As an initial response, the Turkish government implemented an open-door policy, allowing refugees to enter the country without any obstacles. However, along with the increasing number of refugees, various problems emerged such as pressure on the labor market, increased competition in the informal sector, and social tensions between local residents and refugees. In this context, the Turkish government passed the Work Permit Law for Syrian refugees in 2016 as an effort to integrate them into the formal economy. This study aims to analyze how Turkey decided to pass the Work Permit Law for Syrian refugees using the Multiple Streams Framework (MSF). Specifically, this study seeks to explain the social and economic conditions of refugees and examines the dynamics of work permit policies formed from the convergence of three streams in the MSF, namely the problem stream, policy stream, and political stream. This study uses a qualitative method with a document study approach. The data used are secondary data collected from various policy reports, official government documents, academic publications, and other reliable sources relevant to the period 2011 to 2016. The analysis was conducted by tracing the factors that contributed to the birth of the work permit policy and the political and economic dynamics that influenced the ratification process. The results of the study indicate that the work permit policy for Syrian refugees is a strategic response to the challenges that arise due to the increasing number of refugees. Within the MSF framework, the problem stream includes socio-economic tensions and limited access to public services for refugees. The policy stream is marked by the ratification of the Work Permit Law as an integrative solution, while the political stream reflects the support of the Justice and Development Party (AKP) and international pressure, especially from the European Union. This policy is designed to integrate refugees into the formal labor market with certain regulations such as worker quotas, geographical restrictions, and work sector regulations. The Turkish government, in collaboration with international organizations such as UNHCR and ILO, continues to address implementation barriers through skills training programs and public awareness campaigns. This study provides insights for other countries in designing inclusive policies that can support the sustainable integration of refugees into society.

Keywords: Refugees, Syria, Turkey, Policy, Work.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang sipil di Suriah pada tahun 2011 memiliki implikasi substansial bagi wilayah dan politik global. Salah satu implikasi yang paling besar dari perang sipil adalah pengusiran warga Suriah yang jumlahnya hingga jutaan jiwa. Banyak dari warga Suriah yang diusir, pindah ke negara-negara tetangga, bahkan hingga keluar kawasan. Pengusiran ini memiliki dampak berbentuk tekanan pada sistem internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah pengusiran ini mempengaruhi bagaimana politik global mengambil sikap dalam mengatur undang-undang tentang imigran, ataupun dampak ekonomi negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi (Loft, Sturge, and Kirk-Wade 2023).

Dilihat dari awal konflik Suriah, pergerakan dari kelompok masyarakat menuntut adanya reformasi pemerintah monarki yang dipimpin oleh Bashar al-Assad dimana menimbulkan banyak korban jiwa, terutama masyarakat sipil. Warga Suriah pergi dari negara mereka sendiri karena terpaksa oleh keadaan yang ada disana, ditambah banyak masyarakat yang kehilangan rumah mereka akibat dari serangan udara yang dilancarkan oleh pemerintah Suriah (Podraza 2018).

Turki merupakan salah satu negara yang membuka pintu untuk pengungsi Suriah. Mereka hanya menyandang status “perlindungan sementara” semenjak tahun 2014. Turki telah melakukan reformasi legislatif dan kelembagaan untuk membangun sistem suaka nasional yang efektif sesuai dengan standar internasional (UNHCR Turkey, n.d.) Kebijakan pintu terbuka Turki terhadap pengungsi Suriah

didasarkan pada arahan Uni Eropa sejak Juli 2001 dan memperluas perlindungan sementara bagi pengungsi yang tiba dalam situasi arus masuk massal (Kirişci 2013).

Berdasarkan data dari Portal Data Operasional *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang di keluarkan oleh Pemerintahan Turki pada 30 September 2024 menyatakan bahwa total keseluruhan pengungsi Suriah yang terdaftar di turki sebesar 4.983.896 jiwa penduduk. Namun angka ini mencakup 1.9 juta jiwa penduduk Suriah yang terdaftar di Mesir, Yordania, Irak dan Mesir yang dikonfirmasi oleh UNHCR. Sedangkan untuk wilayah Turki sebesar 3,76 juta jiwa penduduk Suriah yang disebutkan oleh UNHCR Pemerintahan Turki. Dalam hal ini, sebesar 3.093.909 jiwa warga Suriah yang mengungsi di Turki yang terdaftar sebagai pencari suaka dan sebesar 275.958 jiwa terdaftar sebagai pengungsi camp yang secara keseluruhan tersebar di perkotaan hingga pedesaan Turki (UNHCR 2022).

Diskursus tentang pengungsi di Turki mulai muncul pada tahun 2011, setelah konflik bersenjata di Suriah dimulai. Pada tahap awal, pemerintah Turki menerapkan *open door policy*, yang memperbolehkan pengungsi Suriah memasuki wilayahnya dan memberi mereka perlindungan sementara. Kebijakan ini merupakan bentuk dari tindakan kemanusiaan, yang mencerminkan hubungan historis dan budaya antara Turki dan Suriah. Awalnya, tanggapan publik sebagian besar positif, dengan banyak orang Turki memandang para pengungsi sebagai korban kekerasan yang mengerikan. Hubungan budaya dan agama yang serupa antara orang Turki dan Suriah juga membantu menciptakan rasa solidaritas, dan upaya pemerintah memperoleh dukungan luas. Namun, seiring dengan terus bertambahnya jumlah pengungsi, perhatian mulai bergeser. Antara tahun 2014 dan 2015, perdebatan meluas hingga mencakup dampak ekonomi dan sosial dari

menampung begitu banyak pengungsi. Selama waktu ini, masalah ketenagakerjaan mulai mendapat perhatian. Pertumbuhan pengungsi Suriah di sektor informal memicu diskusi tentang dampaknya terhadap kesempatan kerja, remunerasi, dan interaksi sosial.

Pada tahun 2015, perdebatan semakin intensif, dengan isu-isu seperti persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, eksploitasi tenaga kerja pengungsi, dan beban pada masyarakat tuan rumah menjadi pusat perhatian. Hal ini menandai dimulainya diskusi yang lebih mendalam tentang posisi pengungsi Suriah di pasar tenaga kerja Turki dan tantangan yang muncul dalam integrasi mereka ke dalam sektor ekonomi resmi. Namun, seiring meningkatnya konflik Suriah, jumlah pengungsi di Turki tumbuh pesat. Pada tahun 2013, populasi pengungsi telah melampaui 1 juta, dan pada tahun 2015, jumlahnya telah melampaui 2,7 juta. Peningkatan dramatis ini memberikan tekanan signifikan pada ekonomi, pasar tenaga kerja, dan layanan publik Turki. Akibatnya, sentimen publik mulai bergeser. Kekhawatiran tentang persaingan ekonomi, tekanan pada layanan publik, dan perbedaan budaya mulai muncul. Masyarakat lokal, terutama di wilayah perbatasan dan kota-kota besar seperti Istanbul dan Gaziantep, mengungkapkan rasa frustrasi atas beban yang dirasakan karena menampung begitu banyak pengungsi. Masalah pengungsi menjadi topik yang bermuatan politis, dengan partai-partai oposisi, seperti Partai Rakyat Republik (CHP), mengkritik penanganan krisis oleh pemerintah dan berpendapat bahwa pemerintah memprioritaskan pengungsi daripada kebutuhan warga negara Turki. Kritik ini bergema di kalangan masyarakat yang merasa diabaikan.

Pada tahun 2015, dampak sosial-ekonomi dari krisis pengungsi menjadi tidak dapat diatasi. Angka pengangguran meningkat, upah di sektor informal

turun, dan layanan publik seperti perawatan kesehatan dan pendidikan mencapai batas maksimal. Di beberapa daerah, ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal menyebabkan protes dan insiden kekerasan. Misalnya, ada laporan bentrokan antara warga negara Turki dan pengungsi Suriah di kota-kota seperti Ankara dan İzmir. Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik selama periode ini. Sementara beberapa media menyoroti aspek kemanusiaan dari krisis tersebut, yang lain berfokus pada dampak negatifnya, seperti meningkatnya angka kejahatan dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini berkontribusi pada wacana publik yang terpolarisasi, dengan beberapa segmen masyarakat menyatakan permusuhan langsung terhadap pengungsi, sementara yang lain terus mengadvokasi dukungan kemanusiaan.

Turki menampung jumlah pengungsi terbesar secara global, dengan total 4 juta pada tahun 2020. Lebih dari 98% pengungsi di Turki tinggal di daerah perkotaan di kota-kota besar dan padat seperti Istanbul, Gaziantep, dan Hatay. Berdasarkan survei terhadap 300 pengungsi Suriah di Istanbul dan Gaziantep, keberadaan warga Suriah di Turki sebagian besar bersifat perkotaan dengan para pengungsi yang menetap di kota-kota regional di sepanjang perbatasan Suriah-Turki dan di kota-kota besar di Turki bagian barat.

Turki juga membentuk kebijakan lainnya ditahun 2016 berupa membatasi jumlah pengungsi dengan tujuan mengendalikan arus pengungsi. Dalam hal ini, pemerintah Turki mengakhiri bentuk kebijakan bebas visa bagi pengungsi Suriah baik yang datang melalui darat atau laut yang sebelumnya dibentuk tahun 2011. Bahkan Turki membentuk penghalang besar untuk keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan. Kebijakan dan langkah-langkah pembaruan terkait pembatasan tersebut terkait pengungsi Suriah menghasilkan dampak positif dengan

berkurangnya jumlah pengungsi Suriah.

Akan tetapi, sejak menetap di Turki sebagai pengungsi dan pencari suaka tentunya mengalami ketidakseimbangan dalam hal pelayanan publik dan domestik. Sebagian besar dari mereka menghadapi situasi yang menantang dan sering kali tidak menentu. Meskipun demikian, negara ini berupaya menyediakan akses bagi para pengungsi terdaftar terhadap hak dan layanan dasar, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan hingga sektor pekerjaan. Akan tetapi, depresiasi, inflasi tinggi, dan dampak sosial ekonomi masih memperburuk kondisi kehidupan para pengungsi yang sudah sulit.

Tantangan lainnya yang juga berdampak besar pada kehidupan pengungsi Suriah yakni kehilangan pekerjaan, mengakibatkan penurunan pendapatan dan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Banyak diantaranya mereka kehilangan pendapatan sehingga memaksa untuk mengurangi kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan. Sebesar 200.000 bantuan tunai darurat telah diberikan oleh UNHCR kepada pengungsi tambahan di Irak, Yordania, Mesir, Lebanon dan Turki. Meski demikian, Pemerintahan Turki tetap berupaya untuk bisa mengatasi kondisi tersebut, khususnya pada aspek sosial, kesehatan dan ekonomi pengungsi Suriah.

Beberapa pengungsi Suriah yang berstatus sebagai pengungsi dengan perlindungan sementara juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan informal namun dengan gaji di bawah standar. Jenis pekerjaannya pengungsi Suriah tersebut juga terbatas pada sektor pertanian dan peternakan. Hal tersebut dikarenakan untuk sektor pekerjaan lainnya memerlukan izin kerja yang sulit untuk pengungsi yang berstatus sebagai pengungsi dengan perlindungan sementara. Sehingga sebesar 40% pengungsi Suriah hidup di bawah garis

kemiskinan dan 18% lainnya hidup di garis kemiskinan tingkat ekstrem. Menurut data Turkish Directorate General of Migration Management (DGMM), lebih dari 98% pengungsi Suriah memilih untuk tinggal di perkotaan dengan kesempatan kerja yang luas dibandingkan 2% pengungsi lainnya tinggal di penampungan sementara.

Sebelumnya pemerintah Turki mendirikan kamp sebagaipusat penampungan sementara *Temporary Shelter Centers* (TSC). Namun pada tahun 2013, arus pengungsi membanjiri TSC dan sebagian besar pengungsi juga memenuhi *Temporary Shelter Centers* (TSC) pada tahun 2014. Namun kamp-kamp tersebut ditutup oleh UNHCR dengan tujuan membentuk fasilitas integral pengungsi dengan tujuan mencapai kemandirian sosial dan mengurangi adanya konsekuensi untuk tinggal di kamp dalam jangka panjang.

Sejak penutupan kamp tersebut, pengungsi dipindah tempatkan di kamp lainnya atau menetap di wilayah perkotaan Turki. Menurut *Economic Research Foundation of Turkey Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı* (TEPAV), sebanyak 2,2 juta pengungsi Suriah usia kerja. Namun sekitar 1 juta diantaranya bekerja secara informal sehingga tidak memiliki perlindungan pekerja dan terhindar dari pajak Turki. Menurut Kementerian Dalam Negeri Turki, sekitar 32.000 orang pengungsi Suriah, sebanyak 1,5% diantaranya merupakan tenaga kerja, bekerja informal dan memegang izin kerja. Angka tersebut menunjukkan sebagian besar pengungsi Suriah menganggur atau tidak memiliki pekerjaan seperti IRT dan pelajar.

Pada tahun 2016, pemerintahan Turki memberikan pengumuman sistem kerja berupa izin kerja bagi pengungsi Suriah untuk menyelesaikan ketenagakerjaan Suriah. Namun hanya beberapa pengungsi Suriah yang mampu

memperoleh izin tersebut dengan berbagai persyaratan yang rumit, seperti penundaan izin kerja, pengabaian penerbitan hingga jam kerja maksimum dengan upah di bawah minimum. Namun, sebagian dari pengungsi tersebut masih mendapatkan jaminan tersebut tentunya melalui prosedur yang rumit yang berbeda dengan pengungsi yang berstatus sebagai pengungsi dengan perlindungan sementara di daerah terpencil (Makovsky 2019).

Perang saudara dan pengungsian warga Suriah yang munculnya berbagai implikasi yang signifikan bagi kawasan dan politik global. Tanggapan negara-negara, seperti Turki, terhadap krisis pengungsi dan tantangan terhadap pengungsi Suriah telah menyoroti pentingnya menangani kebutuhan kemanusiaan terutama pada aspek sosial-ekonomi dari populasi pengungsi. Situasi yang kompleks dan berkembang ini menggarisbawahi perdebatan yang sedang berlangsung seputar tanggung jawab global, hukum imigran, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi migrasi paksa. Dengan melihat adanya kebijakan strategis dari Pemerintahan Turki terkait perlindungan pengungsi Suriah melalui pengesahan UU/Hukum izin kerja pengungsi Suriah tahun 2016, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Turki memutuskan untuk mengesahkan UU/Hukum izin kerja pengungsi Suriah tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bagaimana Turki memutuskan untuk mengesahkan UU/Hukum izin kerja pengungsi Suriah tahun 2016, memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan isu pengungsi Suriah yang bekerja di Turki.

2. Menganalisis kebijakan UU/Hukum izin kerja tahun 2016 terhadap pengungsi Suriah.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini hanya mencakup tahun 2014 hingga 2016 karena periode ini mencakup perkembangan utama dari munculnya wacana pekerja pengungsi hingga implementasi regulasi izin kerja pengungsi Suriah di Turki. Masyarakat Turki mulai menyatakan kekhawatiran tentang pengungsi Suriah yang mencari suaka di Turki pada tahun 2014 ketika kehadiran mereka yang semakin meningkat di pasar tenaga kerja menyebabkan kekhawatiran tentang persaingan dan eksploitasi pekerjaan bersama dengan tekanan sosial-ekonomi. Undang-Undang Izin Kerja 2016 yang disahkan pada Januari 2016 menjadi tonggak penting yang bertujuan untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam sektor pekerjaan formal dan mengurangi ketergantungan bantuan kemanusiaan sambil mengatasi kesulitan sosial-ekonomi yang muncul. Insentif domestik dan tekanan internasional termasuk Perjanjian UE-Turki di Maret 2016 mendorong waktu pemberlakuan undang-undang tersebut. Keterbatasan tersebut mengkaji bagaimana kebijakan tersebut berkembang dan apa artinya selama ini terutama bagaimana percakapan tentang pekerja pengungsi berkembang menjadi pekerjaan resmi melalui Undang-Undang Izin Kerja 2016.

1.5 Tinjauan Pustaka

Literatur yang pertama yaitu artikel "*Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers*" yang ditulis oleh Ahmet İçduygu dan Eleni Diker, fokus utama penelitian mereka adalah pada proses integrasi pengungsi Suriah ke dalam pasar tenaga kerja formal di Turki setelah implementasi kebijakan izin kerja tahun 2016. Mereka menyoroti bagaimana regulasi izin kerja, termasuk prosedur

administratif, kelayakan, dan sistem kuota, mempengaruhi kesempatan kerja bagi pengungsi Suriah. Dengan menitikberatkan pada dampak kebijakan ini terhadap industri yang mempekerjakan tenaga kerja Suriah, terutama usaha kecil dan menengah, penelitian mereka mengkaji tantangan yang muncul dalam implementasi kebijakan serta bagaimana hambatan struktural dalam pasar tenaga kerja dapat menghambat integrasi pengungsi secara efektif. Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini memiliki fokus yang berbeda meskipun masih berkaitan dengan kebijakan izin kerja pengungsi Suriah di Turki. Skripsi ini lebih menekankan pada proses pembuatan kebijakan di balik pengesahan Undang-Undang Izin Kerja 2016, bukan hanya dampaknya terhadap pasar tenaga kerja. Dengan menggunakan pendekatan *Multiple Streams Framework* (MSF), skripsi ini berupaya memahami bagaimana kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam analisisnya, penelitian ini mengeksplorasi tiga aliran dalam MSF: problem stream, yang mencerminkan tantangan sosial-ekonomi akibat tingginya jumlah pengungsi; policy stream, yang mencerminkan bagaimana Undang-Undang Izin Kerja diformulasikan sebagai solusi; serta political stream, yang melibatkan peran pemerintah, partai politik, dan tekanan dari aktor internasional seperti Uni Eropa. Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian İçduygu dan Diker dengan skripsi ini adalah bahwa mereka lebih berfokus pada integrasi tenaga kerja dan dampak kebijakan izin kerja terhadap sektor ekonomi, sedangkan skripsi ini lebih meneliti latar belakang politik dan proses formulasi kebijakan yang menyebabkan pengesahan Undang-Undang Izin Kerja 2016. Analisis dalam skripsi ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang dinamika kebijakan publik di Turki, menjelaskan bagaimana keputusan diambil dalam konteks tekanan domestik dan internasional, serta bagaimana kebijakan ini dirancang sebelum diimplementasikan.

Literatur kedua yaitu “*Syrian refugees in Turkey: pathways to precarity, differential inclusion, and negotiated citizenship rights*” oleh Feyzi Baban, Suzan Ilcan, dan Kim Rygiel (2017). Pada artikel ini peneliti mencoba mengeksplorasi tantangan yang dihadapi pengungsi Suriah di Turki, dengan fokus pada kondisi pengungsi yang tidak stabil, adanya inklusi sosial, dan upaya untuk memperjuangkan hak mereka di Turki. Para penulis menekankan ketidakpastian dari kehidupan pengungsi, yang ditandai dengan status hukum yang tidak pasti, akses terbatas, dan kesulitan untuk merencanakan masa depan, yang diperkuat oleh kebijakan perlindungan sementara Turki. Meskipun ada kendala ini, pengungsi mencoba untuk menegosiasikan hak-hak mereka dan mencoba meningkatkan kondisi mereka, meskipun upaya ini sering terhalang oleh hambatan sistemik. Artikel ini menantang narasi kemanusiaan yang menggambarkan pengungsi Suriah sebagai pihak yang menyerukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti mencoba untuk menjadi status penduduk tetap dan akses yang lebih baik ke layanan sosial, untuk mengatasi ketimpangan struktural yang dialami pengungsi. Dengan menyoroti peran pengungsi dan kompleksitas integrasi mereka, para penulis menganjurkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan terhadap inklusi pengungsi di Turki.

Literatur ketiga yaitu “*Stanbul Local Government Policy on Managing Syrian Refugees Integration*” yang ditulis oleh Audi Izzat Muttaqien dan Sidik Jatmika, diterbitkan pada tahun 2023 mengenai kebijakan pemerintah lokal Istanbul dalam mengelola integrasi pengungsi Suriah, penelitian ini berfokus pada kebijakan izin kerja untuk pengungsi Suriah di Turki pada tahun 2016 yang lebih terperinci dalam hal pembuatan kebijakan. Artikel ini membahas kebijakan umum pemerintah Istanbul dalam mendukung pengungsi Suriah, yang mencakup

integrasi sosial serta penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, penelitian ini lebih mendalami proses legislatif di balik pengesahan Undang-Undang Izin Kerja 2016, yang memberikan pengungsi kesempatan untuk mengakses pasar tenaga kerja formal di Turki. Perbedaan utama antara penelitian ini dan artikel tersebut terletak pada fokusnya. Artikel ini lebih mengarah pada peran pemerintah daerah dan kebijakan sosial yang berkaitan dengan integrasi pengungsi, yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Sementara itu, penelitian ini menggali lebih dalam tentang kebijakan administratif dan legislatif yang memungkinkan pengungsi Suriah mendapatkan izin kerja secara sah, serta implikasi dari kebijakan tersebut terhadap integrasi ekonomi pengungsi ke dalam masyarakat Turki. Penelitian ini lebih menekankan pada peraturan dan prosedur hukum terkait izin kerja dan bagaimana kebijakan ini berdampak pada pengungsi dalam jangka panjang. Sementara artikel tersebut lebih berfokus pada kebijakan yang lebih umum terkait penerimaan pengungsi dan integrasi sosial mereka di Istanbul. Meski keduanya membahas pengungsi Suriah, penelitian ini lebih spesifik pada aspek hukum dan kebijakan ketenagakerjaan, yang berbeda dari pendekatan integrasi sosial yang dibahas dalam artikel tersebut.

Dari penjelasan diatas, penulis menawarkan analisis tentang kondisi yang tidak menentu dan inklusi yang berbeda, tetapi tidak secara khusus membahas proses kebijakan di balik pengesahan peraturan izin kerja bagi pengungsi Suriah oleh pemerintah Turki pada tahun 2016. Meskipun artikel tersebut menyoroti tantangan struktural yang dihadapi pengungsi, seperti akses ke tenaga kerja dan status hukum yang tidak stabil, artikel tersebut kurang membahas faktor politik, ekonomi, atau sosial yang menyebabkan perubahan kebijakan yang signifikan. Skripsi ini akan mengatasi kesenjangan ini dengan fokus pada bagaimana

pemerintah Turki menyeimbangkan tekanan domestik, kebutuhan ekonomi, dan harapan internasional dalam penerapan kebijakan izin kerja, serta menggali lebih dalam tentang proses pembuatan kebijakan yang mendasari keputusan tersebut. Dengan demikian, skripsi ini memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki pada tahun 2016.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan kerangka pemikiran dari buku John W. Kingdon "*Agendas, Alternatives, and Public Policies*" (2014). Dalam analisisnya, Kingdon mengidentifikasi tiga aliran penting dalam proses perumusan kebijakan publik: aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik. Penelitian ini akan menerapkan ketiga aliran ini untuk memahami bagaimana pemerintah Turki merumuskan kebijakan Undang-Undang Izin Kerja 2016 untuk melindungi pengungsi Suriah di Turki. Menurut Kingdon, perubahan kebijakan terjadi ketika ketiga aliran ini bertemu pada saat-saat kritis yang disebut jendela kebijakan (*Window Policy*). Jendela ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mendorong solusi khusus terhadap masalah yang teridentifikasi, terutama ketika iklim politik mendukung perubahan kebijakan.

1.6.1. *Problem Stream* (Aliran Masalah)

Merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Agar sebuah permasalahan atau isu dinilai sebagai sebuah problematika, maka permasalahan tersebut harus bisa dirasakan oleh setiap orang dalam jumlah banyak. Dalam hal ini, Aliran permasalahan tersebut menjadi hal-hal yang membuat pemerintah tertarik untuk bisa merespon dan menanggapi sebuah isu. Permasalahan inilah yang nantinya berkompetisi antara satu sama lain yang

kemudian dijadikan sebagai bagian dari agenda Pemerintah. Kingdon mengemukakan bahwa jika suatu kondisi tersebut ingin dijadikan sebagai suatu masalah, maka khalayak umum harus bisa memiliki pemikiran yang menggaris bawahi suatu tindakan seharusnya dilakukan untuk mengubahnya. Terdapat tiga mekanisme yang bisa membuat sebuah permasalahan menjadi suatu perhatian bagi pembuat kebijakan yakni Pemerintah sebagai indikator, peristiwa, dan umpan balik. Indikator (*Indicators*) merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menafsir skala serta perubahan yang terjadi dalam masalah tersebut. Kedua peristiwa (*events*) yang berperan untuk memfokuskan perhatian pada bencana, pengalaman pribadi, dan simbol sebagai sebuah masalah. Terakhir, umpan balik (*feedback*) untuk memberikan informasi mengenai tingkat kinerja dan mengindikasikan tingkat kegagalan pencapaian tujuan. Berbagai bentuk mekanisme tersebut juga dikenal sebagai suatu pemicu perhatian publik dan bagi pembuat kebijakan.

1.6.2. *Policy Stream* (Aliran Kebijakan)

Kingdon mendeskripsikan bagian aliran kebijakan (*Policy Stream*) ini layaknya sebagai “*primeval soup*”, yang bermakna bahwa Kingdon menganalogikan proses tersebut untuk mencari solusi dalam aliran tersebut seperti halnya sedang memasak sup. Dalam hal ini, dapat di katakan bahwa dalam aliran kebijakan, ide-ide akan mengambang kemudian berhadapan satu sama lain hingga pada akhirnya saling berkombinasi. Aliran kebijakan (*policy stream*) pada dasarnya berfungsi sebagai arena di mana ide-ide kebijakan berkembang, diuji, dan bersaing untuk menjadi solusi atas suatu masalah. Agar sebuah solusi kebijakan berhasil diadopsi, ide tersebut harus layak secara teknis, diterima secara politik, dan selaras dengan nilai-nilai yang dipegang oleh pembuat kebijakan dan masyarakat. Proses ini juga melibatkan aktor-aktor kebijakan, baik dari dalam

maupun luar pemerintah, yang memainkan peran penting dalam mendukung dan mendorong implementasi kebijakan yang relevan (Kingdon 2014).

1.6.3. *Political Stream* (Aliran Politik)

Aliran politik dalam penyusunan kebijakan mencakup empat komponen penting. Komplemen tersebut diantaranya, Komponen pertama yakni suasana nasional (*national mood*) yang berupa opini publik dan iklim opini. Komponen kedua, kekuatan politik secara terorganisir meliputi partai politik, politik legislatif, serta kelompok penekan. Komponen ketiga, Pemerintahan yang berkaitan dengan perubahan personil dan tim yurisdiksi. Terakhir, komponen pembangunan konsensus yang meliputi proses tawar menawar (*bargaining*), pengelompokan prihal (*bandwagons*), dan pembayaran uang jasa (*tipping*). Selain itu, keberadaan faktor politik juga berperan terhadap *agenda setting*, utamanya jika isu sedang berkembang. Arus politik juga tidak terlepas dari situasi politik yang berpengaruh mendorong perhatian publik, khususnya bagi *policy maker*.

Multiple Streams Framework (MSF) yang dikemukakan oleh John W. Kingdon, kebijakan publik akan terbentuk ketika tiga aliran — masalah, kebijakan, dan politik — bertemu dalam suatu jendela kebijakan (*policy window*). Pada dasarnya, *policy window* terbuka ketika kesempatan untuk membuat perubahan kebijakan muncul, yang biasanya dipengaruhi oleh perubahan dalam kondisi politik atau perubahan dalam persepsi masalah. Ketika jendela kebijakan terbuka, aktor-aktor yang relevan dapat bertindak untuk mengatasi masalah yang ada, dengan membawa solusi yang sesuai. *Policy window* ini adalah momen yang memfasilitasi perubahan kebijakan, karena kebijakan publik tidak akan terbentuk kecuali ada kondisi yang tepat, seperti dorongan politik yang mendukung dan adanya konsensus mengenai masalah yang harus dipecahkan. Waktu yang tepat

untuk membuka jendela kebijakan di Turki adalah akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016. Periode ini menandai konvergensi masalah, kebijakan, dan arus politik, yang menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pemberlakuan Undang-Undang Izin Kerja tahun 2016. Jendela kebijakan memungkinkan Turki untuk menangani krisis pengungsi secara strategis, dengan menyeimbangkan komitmen kemanusiaan dengan pertimbangan sosial-ekonomi dan politik.

Setelah *policy window* terbuka, maka *policy entrepreneur* dapat bertindak. *Policy entrepreneur* adalah individu atau kelompok yang berusaha memulai perubahan dalam proses kebijakan untuk membuatnya lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan yang ada. Mereka adalah aktor yang rela menginvestasikan waktu, energi, reputasi, dan sumber daya lainnya untuk mendorong solusi yang mereka usulkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kingdon, mereka berperan untuk mempertemukan dan menghubungkan tiga aliran tersebut — masalah, kebijakan, dan politik — dengan cara menunjukkan bahwa solusi yang mereka tawarkan adalah respons terbaik untuk masalah yang dihadapi. Sebagai penghubung antara solusi dan masalah, *policy entrepreneur* memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi kebijakan ketika *policy window* terbuka, dan kesempatan untuk melakukan perubahan kebijakan ada.

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa kebijakan Turki dalam melindungi pengungsi Suriah memiliki efektivitas yang terbatas dan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan pengungsi Suriah, khususnya dalam hal akses sosial ekonomi. Kingdon menekankan pentingnya proses penyusunan kebijakan oleh para pengambil kebijakan dalam pemecahan masalah dan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan Turki melalui

UU/Hukum Izin Kerja Pengungsi Suriah 2016 yang dibentuk oleh pemerintah Turki dinilai sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang umum terjadi di tengah kehidupan pengungsi Suriah, terutama di bidang sosial ekonomi. Dalam hal ini, kondisi pengungsi Suriah di Turki jika ditinjau dari sektor sosial dan ekonomi mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan tingkat pengangguran yang tinggi mendorong pembentukan kebijakan Turki melalui UU/Hukum Izin Kerja Pengungsi Suriah 2016 sebagai jawaban atas isu tersebut (*Problem Stream*).

Isu-isu yang muncul akibat permasalahan tersebut, pemerintah Turki mengaplikasikan ide-ide yang dinilai dominan untuk mengatasi kondisi sosial dan politik pengungsi Suriah yang kemudian dibentuk jadi solusi strategis dalam bentuk kebijakan (*Policy Stream*). Dalam hal ini, meskipun kondisi sosial dan ekonomi pengungsi Suriah menjadi perhatian utama pemerintah Turki, tapi tidak menutup kemungkinan unsur politik untuk juga berperan terhadap *agenda setting*, utamanya saat ini isu perlindungan terhadap pengungsi di setiap negara semakin berkembang. Arus politik juga tidak terlepas dari situasi politik yang berpengaruh mendorong perhatian publik, khususnya bagi *policy maker* (*Political Stream*).

Ketiga arus yang dikemukakan oleh Kingdon tidaklah berdiri sendiri sehingga terdapat pihak penting yang dikenal sebagai *Policy entrepreneur* (PE) untuk menyatukan alur-alur tersebut. Artinya kebijakan publik akan terbentuk jika *Policy entrepreneur* kebijakan mendorong serta mempertemukan ketiga arus tersebut. Adapun *Policy entrepreneur* yaitu aktor baik yang berada dari dalam ataupun luar pemerintahan yang dengan rela menginvestasikan waktu, energi, reputasi, uang, dan pegawai untuk mencapai tujuan dan nilai yang diinginkan. Dalam hal ini, seluruh alur kebijakan yang telah disampaikan sebelumnya juga tidak terlepas dari adanya dukungan dan dorongan dari pihak lain.

Policy entrepreneur dalam konteks kebijakan terkait pengungsi Suriah di Turki dapat diidentifikasi sebagai aktor-aktor utama yang mendorong terbentuknya kebijakan tersebut. Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berperan sebagai *policy entrepreneur* utama dari pihak pemerintah Turki. Mereka secara aktif mendorong penerapan kebijakan *open door policy* dan kemudian melakukan penyesuaian melalui regulasi izin kerja bagi pengungsi Suriah pada tahun 2016. Selain itu, organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Labour Organization* (ILO) juga berperan sebagai *policy entrepreneur* eksternal. Mereka memberikan dukungan teknis, keuangan, dan advokasi yang memungkinkan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pembentukan kamp pengungsi dan penyediaan pelatihan keterampilan bagi pengungsi. Di sisi lain, Uni Eropa berkontribusi sebagai *policy entrepreneur* dengan memberikan tekanan eksternal melalui bantuan finansial sebesar €6 miliar dalam kerangka kesepakatan *EU-Turkey Statement* pada tahun 2016, mendorong implementasi kebijakan terkait pengungsi di Turki. Aktor-aktor ini menginvestasikan waktu, reputasi, dan sumber daya mereka untuk mempertemukan *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang relevan dan adaptif dalam menangani krisis pengungsi Suriah.

Kebijakan Turki melalui UU/Hukum Izin Kerja Pengungsi Suriah 2016 merupakan bentuk realisasi kebijakan Turki untuk mendorong perlindungan terhadap pengungsi Suriah, utamanya dalam hal ketenagakerjaan dan pengangguran. Melalui kerja sama antara pemerintah Turki dan Uni Eropa sebagai pihak *Policy entrepreneur*, pemerintah Turki kemudian menerapkannya sebagai kebijakan strategis pasca perubahan kebijakan *open door policy* dan pengetatan

wilayah perbatasan. Akan tetapi, realisasi kebijakan UU/Hukum Izin Kerja Pengungsi Suriah 2016 dinilai belum strategis karena belum mampu mencapai seluruh lapisan warga negara Suriah di Turki. Selain itu, kerja sama yang dibentuk antara pemerintah Turki dan Uni Eropa mengalami permasalahan sehingga tidak berlanjut hingga sekarang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Dr. Nursapia Harahap, penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan di ilmu-ilmu sosial, terutama berkaitan dengan tingkah laku manusia yang biasanya sulit diatur dengan angka (Harahap 2020). Penelitian ini berdasarkan dari pola pikir yang induktif terhadap suatu fenomena atau gejala sosial (Aminuddin 1998) Proses penelitian ini melibatkan perumusan pertanyaan penelitian yang relevan, merancang prosedur yang tepat, menjadwalkan pengumpulan data dengan partisipan, menganalisis data secara induktif dengan mengidentifikasi tema spesifik dan mengembangkan tema umum secara bertahap, dan akhirnya menafsirkan makna dari data yang dikumpulkan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian yaitu Pemerintah Turki yang memberikan perlindungan bagi pengungsi Suriah. Objek yang diteliti yaitu kebijakan pemerintah Turki kepada pengungsi Suriah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data yang diperoleh akan dikumpulkan melalui

berbagai macam sumber atau dokumen-dokumen tertulis. Sumber-sumber data sekunder yang digunakan mencakup:

1. Publikasi Akademik

Artikel jurnal, buku, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian.

2. Laporan Organisasi Internasional

Laporan dari organisasi terkait dan Uni Eropa terkait pengelolaan pengungsi Suriah, termasuk statistik dan evaluasi kebijakan.

3. Berita dan Media Massa

Artikel dari portal berita, laporan investigatif, dan publikasi media massa.

4. Laporan *Non-Governmental Organizations* (NGOs)

Laporan dari NGO yang bekerja di lapangan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis memulai dengan mengidentifikasi suatu masalah. Setelah itu, masalah yang teridentifikasi dikembangkan menjadi suatu isu yang lebih spesifik. Setelah isu yang lebih dispesifikkan, penulis mencoba mencari buku ataupun jurnal-jurnal yang berkorelasi dengan topik yang ada. Lalu penulis mencoba untuk menetapkan tujuan utama di penelitiannya. Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis dalam bentuk teks. Data yang sudah dikumpulkan akan diklasifikasi menjadi ide utama. Lalu tahap terakhir, penulis melakukan laporan yang bersifat deskriptif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memudahkan penulis dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan atas penelitian ini.

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan gambaran tentang latar belakang kasus, garis besar rumusan masalah, menjelaskan tujuan penelitian, menggambarkan ruang lingkup penelitian, memeriksa literatur yang ada, menyoroti pentingnya penelitian, membahas landasan teori, dan menggambarkan metode penelitian yang digunakan.

BAB II: Kondisi Pengungsi Suriah di Turki Selama Pandemi

Pada bab ini, penulis akan membahas terkait gambaran umum kondisi pengungsi Suriah di negara Turki. Lalu penulis juga menjelaskan kebijakan Turki memberikan perlindungan serta pengaruhnya terhadap kondisi krisis pengungsi Suriah yang ada di sana.

BAB III: Kebijakan Turki dalam Menjaga Pengungsi Suriah

Pada bab ini penulis mencoba mengkaji kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Turki untuk melindungi dan mendukung pengungsi Suriah yang meliputi kebijakan domestik dan internasional beserta dampak UU/Hukum Izin Kerja Pengungsi Suriah 2016. Ini melibatkan penilaian melalui tiga arus utama penting dalam proses formulasi kebijakan publik yakni *problem*, *policy*, dan *political streams*.

BAB IV: Penutup

Bab ini berisi penutup yang akan terdiri dari kesimpulan hingga daftar pustaka. Dalam penelitian ini akan disimpulkan mengenai perlindungan Turki terhadap pengungsi Suriah melalui kebijakan UU/Hukum Izin Kerja Pengungsi Suriah 2016.

BAB 2

MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK DAN KEBIJAKAN IZIN KERJA

2016

2.1. *Problem Stream*: Krisis Pengungsi Suriah di Turki

Berdasarkan Kingdon (2014), aliran masalah (*problem stream*) mengacu pada kondisi yang menjadi perhatian masyarakat luas dan diidentifikasi sebagai isu mendesak yang memerlukan respons kebijakan. Kingdon menyatakan bahwa agar suatu isu diakui sebagai masalah, isu tersebut harus memengaruhi banyak orang dan memunculkan konsensus bahwa tindakan tertentu perlu diambil untuk mengatasinya. Tiga mekanisme utama yang mengangkat suatu isu menjadi perhatian kebijakan adalah indikator, peristiwa, dan umpan balik. Indikator mencerminkan skala dan perubahan yang terjadi pada masalah, seperti statistik pendidikan atau kesehatan. Peristiwa berfungsi untuk memusatkan perhatian pada masalah tertentu, seperti krisis pengungsi yang memuncak pada 2015. Sementara itu, umpan balik memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan sebelumnya, yang mengarahkan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi ulang pendekatan mereka.

Dalam konteks krisis pengungsi Suriah di Turki, sebelum tahun 2016 pengungsi Suriah di Turki menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Tantangan-tantangan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti permasalahan pendidikan di mana banyak anak-anak pengungsi yang kesulitan mengakses pendidikan formal karena kendala bahasa dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, isu kesehatan menjadi sangat krusial, karena banyak pengungsi yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan dasar, terlebih lagi

layanan medis yang lebih kompleks. Beban ekonomi bagi negara penerima juga tidak kalah penting, di mana Turki harus menyediakan berbagai fasilitas dan bantuan bagi pengungsi dalam jumlah yang besar, yang tentu saja memerlukan anggaran yang besar dan mempengaruhi perekonomian negara. Kombinasi dari berbagai tantangan ini membuat integrasi pengungsi Suriah ke dalam masyarakat Turki menjadi proses yang kompleks dan menantang, memerlukan kerja sama yang intensif antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat lokal.

Dari sektor pendidikan, diketahui bahwa hambatan bahasa, keterbatasan kapasitas sekolah, dan kurangnya integrasi sistem pendidikan menjadi tantangan utama. Bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Turki adalah bahasa Turki, sementara mayoritas pengungsi Suriah berbahasa Arab. Perbedaan bahasa ini menyebabkan kesulitan signifikan bagi anak-anak pengungsi dalam memahami materi pelajaran dan berinteraksi dengan guru serta teman sekelas. Ketidakmampuan untuk memahami bahasa pengantar secara efektif menghambat kemampuan mereka untuk belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik. Selain itu, kendala bahasa ini juga menghalangi interaksi sosial, yang mengakibatkan anak-anak pengungsi sulit beradaptasi dan merasa terisolasi dalam lingkungan sekolah (İçduygu and Şimşek 2016, 66). Kondisi ini kemudian menyebabkan anak-anak pengungsi sering kali tertinggal dalam pelajaran dibandingkan dengan teman sekelas mereka yang berbahasa Turki. Selain itu, perbedaan budaya antara pengungsi dan masyarakat setempat juga menambah tantangan dalam integrasi mereka ke dalam sistem pendidikan.

Faktanya, sebelum tahun 2014, tidak ada kerangka hukum yang jelas mengenai integrasi anak-anak pengungsi ke dalam sistem pendidikan Turki.

Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerimaan siswa pengungsi di berbagai wilayah, di mana kebijakan dan praktik yang diterapkan bervariasi tergantung pada daerah dan institusi pendidikan masing-masing. Anak-anak pengungsi sering kali mengalami kesulitan mengakses pendidikan formal karena kurangnya pedoman yang jelas dan konsisten tentang bagaimana mereka harus diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan yang ada (İçduygu and Şimşek 2016, 66).

Meskipun pemerintah Turki kemudian mengeluarkan regulasi No. 2014/21 tentang "Layanan Pendidikan untuk Warga Negara Asing" pada 23 September 2014, implementasi regulasi ini pada praktiknya memerlukan waktu dan tidak segera mengatasi tantangan yang ada. Proses penerapannya di lapangan sering kali menghadapi hambatan seperti kurangnya sumber daya, pelatihan bagi guru, serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung kebutuhan khusus anak-anak pengungsi. Selain itu, pemerintah Turki bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, mendirikan *Temporary Education Centers* (TECs) yang menawarkan pendidikan dengan kurikulum Suriah dan bahasa pengantar Arab (İçduygu & Şimşek 2016, 66). Langkah ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi. TECs diharapkan dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih familier bagi anak-anak ini, sehingga mereka dapat lebih mudah menyesuaikan diri dan mengikuti pelajaran dengan lebih efektif.

Namun, implikasi dari langkah ini adalah fakta bahwa kualitas pendidikan di TECs tidak setara dengan sekolah umum, dan sertifikasi yang diberikan tidak selalu diakui secara resmi (İçduygu & Şimşek 2016, 67). Hal ini menyebabkan

banyak anak pengungsi yang, meskipun telah mengikuti pendidikan di TECs, tetap menghadapi kesulitan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ketika mereka berusaha memasuki pasar kerja. Ketidaksetaraan ini menambah lapisan tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak pengungsi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi prospek masa depan mereka secara keseluruhan.

Dari sektor kesehatan, pada tahun 2014, pemerintah Turki memperkenalkan Peraturan Perlindungan Sementara yang menjamin hak pengungsi Suriah untuk mengakses layanan kesehatan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pengungsi yang berada dibawah perlindungan sementara berhak mendapatkan layanan kesehatan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan, yang bekerja sama dengan Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki atau dalam bahasa Turki yaitu *Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı* (AFAD). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengungsi menerima perawatan kesehatan yang diperlukan, meskipun mereka berada jauh dari tanah air mereka dan menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari (İçduygu & Şimşek 2016, 67).

Namun, akses penuh terhadap layanan kesehatan ini tidak berlaku secara universal untuk semua pengungsi. Pengungsi yang belum terdaftar dengan *The Directorate General for Migration Management* (DGMM) hanya bisa mengakses layanan kesehatan darurat dan layanan kesehatan dasar, seperti perawatan dalam kasus penyakit menular (İçduygu & Şimşek 2016, 67). Ketentuan ini kemudian menciptakan hambatan bagi banyak pengungsi yang belum terdaftar, sehingga mereka tidak mendapatkan perawatan yang layak untuk kondisi medis yang lebih serius atau kronis. Ketergantungan pada status registrasi ini menambah lapisan kompleksitas dalam penyediaan layanan kesehatan bagi populasi pengungsi.

Di sisi lain, perbedaan bahasa sering kali menghambat komunikasi yang efektif antara pengungsi dan tenaga medis. Kesalahpahaman mengenai gejala, diagnosis, dan pengobatan sering terjadi, yang dapat mengakibatkan resep obat yang tidak sesuai atau perawatan yang terlewatkan. Selain itu, faktor budaya dan agama memperumit pemberian layanan kesehatan. Beberapa pengungsi, khususnya perempuan, merasa sulit untuk menyesuaikan keyakinan mereka dengan kehadiran tenaga medis pria. Misalnya, ketiadaan dokter perempuan di beberapa kamp menjadi hambatan besar bagi banyak perempuan yang merasa terbatas oleh keyakinan mereka (Turkish Medical Association 2016).

Satu contoh yang menggambarkan bagaimana hambatan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam layanan medis adalah satu situasi di mana seorang pengungsi perempuan menceritakan pengalamannya saat ia mencari pengobatan untuk gejala flu tetapi, karena kesalahan komunikasi, diberi pil kontrasepsi alih-alih obat yang dimaksudkan. Kesalahpahaman ini terjadi akibat kendala bahasa selama konsultasi, menyoroti perlunya penerjemah atau tenaga medis multibahasa di dalam kamp untuk mencegah kejadian serupa.

Dalam konteks selanjutnya, Pemerintah Turki sejatinya telah menerapkan kebijakan *Open Door Policy* sejak awal konflik Suriah pada tahun 2011. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jutaan pengungsi Suriah yang melarikan diri dari konflik bersenjata di negara mereka. Melalui kebijakan ini, Turki membuka perbatasannya dan menyediakan tempat perlindungan sementara, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan lainnya (Syafitri 2017). Akan tetapi, realitas di lapangan sering kali berbeda dengan tujuan ideal kebijakan tersebut. Banyak pengungsi yang tinggal di luar kamp pengungsian

resmi, memilih untuk menetap di daerah urban atau semi-urban. Dalam situasi ini, mereka menghadapi tantangan berat, terutama dalam berinteraksi dengan komunitas lokal. Meskipun Turki telah memberikan perlindungan hukum melalui status perlindungan sementara (*temporary protection status*), pengungsi tetap sering mengalami diskriminasi yang memengaruhi akses mereka terhadap pekerjaan, layanan publik, dan peluang untuk berintegrasi secara sosial (International Crisis Group 2018, 3).

Diskriminasi juga terjadi dalam bentuk segregasi sosial. Banyak warga lokal yang enggan berinteraksi dengan pengungsi Suriah karena perbedaan bahasa dan budaya. Pengungsi sering kali merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat mencari pekerjaan, mengakses layanan kesehatan, atau bahkan dalam lingkungan tempat tinggal. Situasi ini memperparah isolasi sosial yang mereka alami (International Crisis Group 2018, 3). Perbedaan budaya menjadi tantangan besar dalam proses integrasi pengungsi Suriah di Turki. Norma sosial, tradisi, dan kebiasaan hidup antara pengungsi dan komunitas lokal sering kali berbeda secara signifikan. Pengungsi yang tidak memahami budaya lokal cenderung menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri, sementara masyarakat lokal mungkin memandang perilaku pengungsi sebagai sesuatu yang "tidak sesuai" dengan nilai-nilai mereka (International Crisis Group 2018, 3).

Akibat diskriminasi dan perbedaan budaya serta bahasa, banyak pengungsi Suriah yang mengalami isolasi sosial. Mereka cenderung tinggal dalam komunitas tertutup bersama sesama pengungsi, membatasi interaksi dengan masyarakat lokal. Isolasi ini tidak hanya menghalangi pengungsi untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, tetapi juga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh

pekerjaan yang layak atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Isolasi sosial juga berdampak pada kesehatan mental pengungsi. Studi menunjukkan bahwa pengungsi yang mengalami diskriminasi dan isolasi memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma (Fahham and Kartaatmaja 2014, 50). Perasaan tidak diterima atau ditolak oleh komunitas tuan rumah memperburuk trauma yang sudah mereka bawa akibat konflik di negara asal mereka.

Terkait dengan akses kerja yang dimiliki oleh para pengungsi Suriah sebelum adanya regulasi izin kerja formal, banyak pengungsi Suriah di Turki terpaksa mencari nafkah di sektor informal karena tidak adanya peluang kerja yang legal. Dalam kondisi ini, pengungsi bekerja tanpa perlindungan hukum yang layak, sehingga mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Upah yang diterima sering kali jauh di bawah standar, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Selain itu, banyak pengungsi yang tidak memiliki akses terhadap jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan atau kompensasi kecelakaan kerja, yang memperburuk ketidakpastian dan risiko ekonomi yang mereka hadapi. Ketiadaan kebijakan yang jelas mengenai perlindungan informal menjadikan para pengungsi Suriah sangat bergantung pada pemberi kerja yang sering kali memanfaatkan situasi mereka (Carpio and Wagner 2015, 3).

Kondisi ekonomi yang sulit memaksa banyak keluarga pengungsi Suriah di Turki untuk mengambil langkah-langkah ekstrem guna bertahan hidup, termasuk mengirim anak-anak mereka untuk bekerja. Pekerja anak telah menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di komunitas pengungsi, di mana anak-anak sering kali harus bekerja di sektor informal dengan upah yang sangat rendah. Dalam banyak

kasus, mereka dipekerjakan di lingkungan yang berbahaya, seperti pabrik, lokasi konstruksi, atau pekerjaan berat lainnya, yang tidak hanya melampaui kemampuan fisik mereka tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan. Ketiadaan perlindungan hukum bagi anak-anak pekerja ini semakin memperburuk situasi, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, bahkan kekerasan di tempat kerja (Larasati 2020, 196).

Selain kehilangan masa kecil mereka, anak-anak pengungsi yang bekerja juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang seharusnya menjadi fondasi bagi masa depan mereka. Beban pekerjaan yang berat dan waktu kerja yang panjang membuat mereka tidak bisa bersekolah atau mengikuti program pendidikan informal yang disediakan oleh beberapa lembaga kemanusiaan. Akibatnya, generasi muda pengungsi Suriah terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbatasan peluang, baik di negara tempat tinggal sementara maupun di masa depan mereka. Fenomena ini tidak hanya merugikan anak-anak itu sendiri, tetapi juga menjadi tantangan sosial yang lebih luas bagi komunitas pengungsi dan negara tuan rumah, karena potensi mereka sebagai sumber daya manusia yang produktif tidak dapat berkembang secara optimal.

Di sisi lain, jika dilihat dari sudut pandang Turki sebagai pihak yang menerima para pengungsi, kehadiran jutaan pengungsi Suriah di Turki sejak 2011 telah memberikan tekanan besar pada perekonomian negara tersebut. Pemerintah Turki terpaksa mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, seperti tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pada 9 Juli 2015, Presiden Erdogan mengungkapkan bahwa total dana sebesar \$6 miliar telah dikeluarkan untuk menangani pengungsi

Suriah sejak tahun 2011 hingga Juni 2015. Beberapa bulan kemudian, pada 5 Oktober 2015, Erdogan melaporkan bahwa jumlah pengeluaran telah meningkat menjadi \$7,5 miliar, menunjukkan tambahan \$1,5 miliar dalam waktu hanya tiga bulan atau sekitar \$500 juta per bulan. Ketua AFAD, Fuad Oktay, dalam pertemuan dengan wartawan dari negara-negara Uni Eropa pada 2 Maret 2016, menyatakan bahwa Turki telah mengoperasikan 26 kamp pengungsi. Kamp-kamp ini menyediakan berbagai kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis, seperti rumah kontainer, tenda pengungsian, perawatan kesehatan gratis, serta pendidikan gratis untuk anak-anak pengungsi. Oktay juga menambahkan bahwa total dana yang telah dikeluarkan oleh Turki mencapai \$10 miliar untuk memastikan fasilitas penampungan sesuai dengan standar PBB (Syukran and Ubaidullah 2019).

Dampak kehadiran pengungsi Suriah juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi Turki, khususnya Produk Domestik Bruto (PDB). Antara tahun 2012 hingga 2014, pertumbuhan tahunan PDB rata-rata hanya mencapai 3%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebelum krisis pengungsi yang mencapai 5%. Setelah sempat tumbuh 4,2% pada tahun 2013, perekonomian Turki melambat menjadi 2,9% pada tahun 2014. Penurunan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan politisi, dengan mayoritas pihak memberikan pandangan negatif terhadap dampaknya. Tantangan bagi pemerintah menjadi semakin besar, terutama untuk memulihkan pertumbuhan PDB ke jalur positif. Selain itu, masuknya 2,7 juta pengungsi Suriah juga menimbulkan masalah baru, termasuk tekanan pada sektor pariwisata akibat meningkatnya ancaman terorisme, serta persaingan di pasar kerja antara penduduk lokal dan pengungsi. Hal ini berdampak pada peningkatan tingkat

pengangguran di Turki yang mencapai angka 11% (Syukran & Ubaidullah 2019, 10).

Selain itu, masuknya tenaga kerja pengungsi ke pasar kerja informal menyebabkan persaingan dengan pekerja lokal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pengungsi Suriah sering kali bekerja tanpa izin resmi, menerima upah rendah, dan tidak memiliki akses ke jaminan sosial. Situasi ini berpotensi menurunkan standar upah dan meningkatkan tingkat pengangguran di beberapa daerah, terutama di sektor-sektor dengan keterampilan rendah. Kondisi ini juga memicu ketegangan sosial antara penduduk lokal dan pengungsi, yang merasa bahwa kehadiran pengungsi mengurangi peluang kerja bagi mereka. Perasaan ketidakpuasan ini diperburuk oleh stigma bahwa pengungsi "mencuri" pekerjaan lokal, padahal banyak dari mereka melakukan pekerjaan yang tidak diminati oleh penduduk setempat (Jones 2023).

Dari perspektif *problem stream*, isu masuknya pengungsi Suriah ke Turki dan dampaknya pada pasar kerja serta ekonomi lokal dapat dilihat sebagai masalah yang kompleks. Dalam kasus ini, masuknya pengungsi Suriah menciptakan tekanan pada pasar kerja informal, di mana banyak pengungsi bekerja tanpa izin resmi, menerima upah rendah, dan tidak memiliki jaminan sosial. Situasi ini tidak hanya mempengaruhi kondisi pekerja pengungsi, tetapi juga membawa dampak pada pekerja lokal melalui penurunan standar upah dan peningkatan pengangguran di sektor keterampilan rendah. Ketegangan sosial yang timbul akibat persaingan ini menjadi indikator kuat bahwa masalah ini telah menjadi isu kebijakan yang memerlukan perhatian serius.

Pengangguran yang meningkat di beberapa wilayah Turki dan persepsi masyarakat lokal bahwa pengungsi merampas peluang kerja mereka memperkuat pentingnya isu ini di mata publik. Selain itu, dampak ekonomi makro, seperti penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Turki dan tekanan pada sektor-sektor seperti pariwisata, semakin mempertegas bahwa masalah pengungsi bukan sekadar isu sosial, tetapi juga tantangan ekonomi. Selain itu, data yang menunjukkan pengeluaran pemerintah Turki hingga \$10 miliar untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi juga menjadi bukti kuat bahwa masalah ini telah mencapai skala yang mempengaruhi kebijakan fiskal negara. Sederhananya, dari sudut pandang *problem stream*, salah satu faktor penting yang mendorong isu ini ke agenda kebijakan adalah ketegangan sosial yang terus meningkat antara pengungsi dan masyarakat lokal. Ketegangan ini disebabkan oleh persaingan di pasar kerja, ketidakadilan ekonomi, dan perbedaan budaya yang memperkuat prasangka negatif terhadap pengungsi.

2.1.1 Indikator

Indikator mengacu pada ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menyoroti masalah yang ada, dengan fokus pada pengungsi Suriah dan integrasi mereka ke dalam pasar tenaga kerja Turki. Salah satu indikator utama adalah tingkat pengangguran di kalangan pengungsi yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sekitar 55% pengungsi Suriah yang berada di Turki menganggur, dan mayoritas dari mereka bekerja di sektor informal tanpa izin kerja yang sah (IOM, 2020). Selain itu, tingkat kemiskinan di kalangan pengungsi juga tinggi, dengan sebagian besar pengungsi Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidakmampuan mereka untuk mengakses

pekerjaan yang layak seringkali berdampak pada kesejahteraan sosial mereka. Data lain yang relevan adalah tekanan pada layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan akan pekerjaan dan integrasi pengungsi ke dalam ekonomi formal. Tekanan ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah pengungsi yang mengandalkan pekerjaan informal dan upah yang sangat rendah (Hasly, 2024).

2.1.2 Event

Peristiwa-peristiwa khusus yang memicu perhatian pada masalah pengungsi Suriah di Turki adalah lonjakan jumlah pengungsi yang terjadi pada tahun 2015, yang diakibatkan oleh eskalasi konflik di Suriah. Pada tahun tersebut, Turki menyaksikan peningkatan dramatis jumlah pengungsi, yang sebagian besar datang melalui jalur darat dari Suriah ke Turki (Abidin & Wibowo, 2024). Peristiwa ini menarik perhatian internasional dan nasional terhadap tantangan besar yang dihadapi oleh negara dalam mengelola jumlah pengungsi yang besar. Pada saat yang sama, peristiwa protes masyarakat lokal terkait pengungsi yang tidak memiliki akses yang memadai ke pekerjaan formal juga semakin meningkatkan urgensi untuk merumuskan kebijakan terkait izin kerja untuk pengungsi. Protes menolak pengungsi Suriah pertama kali terjadi pada tahun 2014 dan melibatkan kurang lebih 1.000 warga Turki. Sejak saat itu, setidaknya telah terjadi empat protes berskala besar untuk menolak pengungsi Suriah (Hurriyet Daily News, 2014). Bahkan setelah Undang-Undang Izin Kerja 2016 disahkan, peristiwa ini terus mempengaruhi kebijakan pengungsi, karena banyak pengungsi yang tetap tidak memiliki izin kerja sah dan harus bekerja di sektor informal.

2.1.3 Feedback

Umpan balik dari kebijakan atau program yang ada menunjukkan respon pemerintah terhadap tuntutan dan tekanan publik. Dalam konteks pengungsi Suriah di Turki, kebijakan pengungsi Turki telah mengalami transformasi signifikan sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan domestik dan tantangan ekonomi. Awalnya ditandai dengan *open door policy* yang memberikan pengungsi Suriah akses luas ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan di bawah kerangka perlindungan sementara, kebijakan tersebut secara bertahap bergeser ketika penduduk setempat mulai menganggap kehadiran pengungsi yang besar sebagai beban pada layanan publik dan penyebab pengangguran. Sebagai reaksi, otoritas Turki telah memberlakukan kontrol yang lebih ketat pada pendaftaran dan mobilitas pengungsi dengan membatasi pendaftaran baru di pusat-pusat kota besar dan mewajibkan para pengungsi untuk tetap berada di provinsi tempat pendaftaran awal mereka. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menyebarkan populasi pengungsi secara lebih merata dan mengurangi tekanan terkonsentrasi pada sumber daya kota (Memisoglu & Ilgit, 2017).

Selain itu, pemerintah telah secara aktif mempromosikan pemulangan pengungsi Suriah melalui inisiatif yang dibingkai untuk memastikan pengembalian yang aman, sukarela, dan bermartabat (Morgul, 2023). Retorika ini ditujukan untuk mengatasi sentimen nasionalis dan mengurangi beban pengungsi yang terlihat pada masyarakat Turki, meskipun faktanya kondisi di Suriah masih jauh dari ideal. Lebih jauh lagi, restrukturisasi pengelolaan pengungsi baru-baru ini—terutama melalui peningkatan peran Direktorat Jenderal Pengelolaan

Migrasi—telah memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kontrol yang lebih ketat atas populasi pengungsi dan menyederhanakan proses penentuan kelayakan untuk perlindungan sementara. Pergeseran kebijakan ini, meskipun dirancang untuk menyeimbangkan komitmen kemanusiaan internasional dengan keharusan sosial-politik domestik, telah memicu perdebatan yang cukup besar mengenai keselarasannya dengan kewajiban hukum internasional dan implikasi jangka panjang bagi hak-hak pengungsi.

2.2 Policy Stream: Solusi Potensial untuk Pekerjaan Pengungsi

Gagasan kebijakan mengenai izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki berkembang melalui kolaborasi antara berbagai aktor, baik domestik maupun internasional. Aktor utama dalam pembuatan kebijakan ini adalah pemerintah Turki, terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial, yang memiliki peran kunci dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan peraturan teknis terkait izin kerja bagi pengungsi (Kingdon 2014). Selain itu, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), di bawah pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, turut mendukung inisiatif legislatif ini sebagai bagian dari upaya integrasi pengungsi ke dalam ekonomi formal Turki. Gagasan kebijakan ini tidak hanya muncul dari pemerintahan, tetapi juga mendapat kontribusi signifikan dari organisasi internasional seperti UNHCR (Badan Pengungsi PBB), yang menyediakan data penting terkait jumlah pengungsi dan kondisi sosial-ekonomi mereka, serta dari ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) yang mengadvokasi perlindungan hak-hak buruh pengungsi agar tidak terjebak dalam eksploitasi di sektor informal (Hoefer 2022).

Proses pengembangan kebijakan ini berjalan melalui interaksi ide-ide yang

muncul dari berbagai aktor yang saling berkolaborasi, melalui penelitian, advokasi, dan negosiasi. Ide-ide ini dapat dianggap seperti "sup purba" yang digambarkan oleh Kingdon, di mana berbagai alternatif kebijakan saling bercampur, diuji, dan disaring hingga akhirnya terbentuk solusi yang layak. Aktor-aktor ini, yang terdiri dari pembuat kebijakan dalam pemerintahan, organisasi internasional, serta akademisi dan LSM, memberikan sumbangsih melalui penelitian, pengumpulan data, dan advokasi kebijakan (Patnistik 2024). Misalnya, UNHCR menyediakan data kuantitatif tentang pengungsi dan kondisi sosial-ekonominya, yang membantu mengilustrasikan urgensi kebijakan ini, sementara ILO berperan dalam mengajukan argumen untuk perlindungan hak pekerja dan memastikan bahwa pengungsi memiliki akses ke pekerjaan yang layak. Semua elemen ini berkumpul dan berkontribusi dalam perumusan Peraturan tentang Izin Kerja bagi Orang Asing yang Berada di Bawah Perlindungan Sementara, yang disahkan pada Januari 2016, dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan kemanusiaan dan memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal Turki.

Aliran kebijakan (*policy stream*) berfungsi sebagai arena di mana ide-ide kebijakan berkembang, diuji, dan bersaing untuk menjadi solusi atas suatu masalah. Dalam aliran ini, gagasan kebijakan diibaratkan sebagai "sup purba" (*primeval soup*), di mana berbagai alternatif ide mengapung, bergabung, atau diabaikan. Agar sebuah solusi kebijakan berhasil diadopsi, ide tersebut harus layak secara teknis, diterima secara politik, dan selaras dengan nilai-nilai yang dipegang oleh pembuat kebijakan dan masyarakat. Proses ini juga melibatkan aktor-aktor kebijakan, baik dari dalam maupun luar pemerintah, yang memainkan peran penting dalam

mendukung dan mendorong implementasi kebijakan yang relevan (Kingdon 2014).

Dalam konteks krisis pengungsi Suriah, pada bulan Januari 2016, pemerintah Turki mengesahkan *Peraturan tentang Izin Kerja bagi Orang Asing yang Berada di Bawah Perlindungan Sementara* (selanjutnya disebut *Peraturan tentang Izin Kerja*), yang menjadi dasar hukum bagi pengungsi Suriah untuk mengakses pasar kerja formal. Peraturan ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan kebijakan dan negosiasi antara aktor-aktor domestik dan internasional dalam upaya mencari solusi yang berkelanjutan terhadap meningkatnya jumlah pengungsi di Turki. Kebijakan ini dirancang untuk memungkinkan integrasi ekonomi pengungsi dengan memberikan mereka kesempatan bekerja secara legal di Turki, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan kemanusiaan dan mencegah eksploitasi di sektor informal. Pemerintah Turki, terutama melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial, memainkan peran utama dalam perumusan kebijakan ini, dengan dukungan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Selain itu, organisasi internasional seperti UNHCR, *International Labour Organization* (ILO), dan Uni Eropa juga berperan dalam mendorong kebijakan ini, terutama melalui bantuan teknis dan pendanaan. Dalam implementasinya, permohonan izin kerja dapat diajukan oleh pemberi kerja atas nama pengungsi Suriah yang mereka pekerjakan, atau diajukan langsung oleh pengungsi yang bekerja secara mandiri. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan kemanusiaan serta mendorong kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal (Badalić 2023, 2).

Jika dilihat dari sudut pandang tujuannya, kebijakan ini memiliki beberapa

sasaran strategis. Pertama, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi eksistensi tenaga kerja pengungsi di sektor informal, yang selama bertahun-tahun menjadi tempat utama bagi pengungsi mencari nafkah. Sektor informal, meskipun menjadi penyelamat ekonomi bagi banyak pengungsi, sering kali melibatkan eksploitasi, upah rendah, dan kondisi kerja yang buruk tanpa perlindungan hukum. Dengan memberikan akses ke pekerjaan formal, pemerintah berharap untuk melindungi hak-hak pekerja pengungsi serta mengurangi risiko eksploitasi. Kedua, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih transparan dan terkontrol, yang memungkinkan pemerintah untuk memantau aktivitas ekonomi para pengungsi serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi Turki (Badalić 2023, 3).

Ironisnya, program izin kerja untuk pengungsi Suriah ternyata kurang populer dan belum banyak dikenal oleh komunitas pengungsi. Hingga saat ini, hanya sekitar 32.000 warga Suriah yang berhasil memperoleh izin kerja. Proses pengajuan izin kerja menghadirkan berbagai kendala dan disinsentif bagi pengungsi. Salah satu hambatan utama adalah persyaratan bahwa pengungsi hanya dapat bekerja di provinsi tempat mereka terdaftar sebagai penerima perlindungan sementara (Makovsky 2019, 18). Pendaftaran ini biasanya dilakukan dalam waktu 10 hari setelah kedatangan di Turki, sehingga mayoritas pengungsi terdaftar di provinsi-provinsi perbatasan seperti Hatay, Gaziantep, atau Sanliurfa, yang menjadi titik masuk utama dari Suriah. Sementara itu, sebagian besar peluang kerja tersedia di kota-kota besar di wilayah barat Turki, seperti Istanbul, Izmir, dan Bursa, sehingga pengungsi sering kali menghadapi kesenjangan geografis dalam mencari pekerjaan.

Selain itu, terdapat hambatan lain yang memperumit proses perolehan izin kerja. Pengungsi hanya dapat menerima izin kerja jika didukung oleh calon pemberi kerja yang bersedia mengajukan permohonan atas nama mereka. Lebih Pengungsi juga harus terdaftar sebagai penerima perlindungan sementara selama minimal enam bulan sebelum dapat mengajukan izin kerja. Kondisi ini kemudian diperparah dengan keterlambatan dalam proses penerbitan izin kerja (Makovsky 2019, 19). Lebih jauh, meskipun biaya izin kerja telah dikurangi dari 600 lira menjadi 250 lira (sekitar \$47), jumlah tersebut tetap menjadi beban finansial yang signifikan bagi banyak pengungsi. Pengajuan izin kerja juga memiliki konsekuensi lain, yaitu penghentian bantuan langsung dari program *Emergency Social Safety Net* (ESSN), yang didanai oleh Uni Eropa dan dikelola oleh Palang Merah Turki. Di mana bantuan ini sering menjadi sumber penghidupan utama bagi pengungsi yang paling rentan, sehingga banyak pengungsi enggan beralih ke pekerjaan formal (Makovsky 2019, 19).

Bagi pemberi kerja, terdapat beberapa hambatan yang membuat mereka enggan mempekerjakan pengungsi Suriah secara resmi. Salah satu tantangan terbesar adalah kewajiban untuk membayar pekerja Suriah sesuai dengan upah minimum dan mematuhi batas maksimum jam kerja, sama seperti pekerja Turki. Ketentuan ini membuat pekerja pengungsi dengan izin kerja kurang menarik bagi pemberi kerja yang lebih memilih tenaga kerja ilegal, karena dapat membayar upah di bawah standar dan memanfaatkan jam kerja yang melebihi batas legal. Eksploitasi pekerja pengungsi menjadi masalah serius, dengan banyak laporan yang menunjukkan bahwa pengungsi Suriah sering mengalami perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi dari pemberi kerja yang tidak bertanggung jawab (Makovsky 2019, 19).

Birokrasi dan biaya tambahan juga menjadi tantangan bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan pengungsi Suriah secara legal. Pemberi kerja diwajibkan untuk membayar kontribusi jaminan sosial bagi pekerja pengungsi dan memenuhi kuota yang mengharuskan setidaknya 90 persen karyawan mereka adalah warga negara Turki. Kuota ini hanya dapat dikecualikan jika pemberi kerja dapat membuktikan bahwa mereka tidak berhasil menemukan pekerja Turki yang memenuhi syarat selama periode empat minggu sebelum pengajuan izin kerja. Proses yang rumit ini sering kali membuat pemberi kerja lebih memilih untuk menghindari aturan ini dan mempekerjakan pengungsi secara informal. Akibat berbagai hambatan ini, tujuan peraturan izin kerja untuk mendorong integrasi pengungsi ke dalam pasar kerja formal masih sulit tercapai di lapangan. Sebagian besar pengungsi tetap bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum, sementara banyak pemberi kerja lebih memilih cara-cara yang menghindari beban administratif dan finansial dari regulasi (Makovsky 2019, 19).

Untuk mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan pengungsi Suriah ke pasar kerja formal di Turki, berbagai organisasi internasional telah memainkan peran penting. Salah satu organisasi yang berkontribusi signifikan adalah *International Labour Organization* (ILO). ILO aktif menyediakan program pelatihan keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas kerja para

pengungsi. Program-program ini mencakup pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan praktis, yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di Turki. Dengan pelatihan ini, pengungsi lebih siap untuk memenuhi standar yang diperlukan di sektor formal dan memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh pemberi kerja. Pelatihan ini tidak hanya mendukung pengungsi secara individu tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu (Larasati 2020, 191).

Selain pelatihan keterampilan, ILO juga menyediakan kursus bahasa untuk membantu pengungsi mengatasi hambatan komunikasi, yang sering menjadi penghalang utama dalam mencari pekerjaan formal. Kursus ini mempersiapkan pengungsi untuk berinteraksi secara efektif dengan pemberi kerja dan rekan kerja di tempat kerja. Lebih jauh lagi, ILO berperan aktif dalam menangani isu pekerja anak di kalangan pengungsi Suriah. Melalui forum internasional dan lokakarya, organisasi ini mengajak negara-negara anggota untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan yang berfokus pada perlindungan anak. Dengan demikian, ILO tidak hanya meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja pengungsi tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang adil dan bebas dari eksploitasi (Larasati 2020, 201).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pengungsi Suriah di Turki. Organisasi ini telah lama bekerja sama dengan pemerintah Turki untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi pencari suaka dan pengungsi. Salah satu fokus utama UNHCR adalah mendukung integrasi pengungsi ke dalam masyarakat tuan

rumah melalui berbagai program. Program ini mencakup repatriasi sukarela bagi mereka yang ingin kembali ke negara asal, integrasi lokal untuk pengungsi yang memilih menetap, serta pemukiman kembali di negara ketiga bagi mereka yang tidak dapat kembali atau bertahan di tempat tinggal sementara (Suhartono 2017)

Kemudian, UNHCR juga memainkan peran penting sebagai penyedia bantuan kemanusiaan. Bantuan ini mencakup distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi pengungsi yang paling rentan. Selain itu, UNHCR berfokus pada pengembangan kapasitas pengungsi melalui pendidikan dan pelatihan, yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Dalam konteks perlindungan, UNHCR juga mendukung upaya pemerintah Turki untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati, termasuk akses ke pekerjaan formal dan layanan publik. Dengan pendekatan holistik ini, UNHCR tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan solusi jangka panjang bagi pengungsi (Suhartono 2017, 4).

Selain dukungan dari organisasi internasional, Uni Eropa (UE) telah memberikan bantuan finansial yang substansial kepada Turki untuk mendukung integrasi ekonomi pengungsi. Pada Maret 2016, UE dan Turki mencapai kesepakatan yang mencakup komitmen UE untuk menyediakan dana sebesar €149.6 juta untuk membantu pengungsi Suriah di Turki. Dana ini digunakan untuk berbagai program, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi pengungsi. Salah satunya, program *Emergency Social Safety Net* (ESSN), yang merupakan program kemanusiaan terbesar dalam sejarah UE, memberikan bantuan

tunai bulanan kepada sekitar 1,8 juta pengungsi di Turki untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Uni Eropa Reporter Koresponden 2021).

Selain dukungan dari organisasi internasional seperti ILO dan UNHCR, Uni Eropa (UE) juga memberikan kontribusi besar melalui bantuan finansial yang signifikan kepada Turki. Pada Maret 2016, UE dan Turki mencapai kesepakatan yang mencakup komitmen UE untuk menyediakan dana sebesar €149.6 juta yang bertujuan membantu pengungsi Suriah di Turki. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup pengungsi serta meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah Turki. Salah satu program unggulan yang didukung oleh dana ini adalah *Emergency Social Safety Net* (ESSN). ESSN merupakan program bantuan kemanusiaan terbesar dalam sejarah UE, yang memberikan bantuan tunai bulanan kepada sekitar 1,8 juta pengungsi di Turki. Bantuan ini memungkinkan pengungsi memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian (Uni Eropa Reporter Koresponden 2021).

Dari perspektif *policy stream* yang dikemukakan oleh John W. Kingdon, kebijakan terkait pengungsi Suriah di Turki, termasuk peraturan izin kerja, bantuan internasional, dan program integrasi, dapat dianalisis sebagai upaya menciptakan solusi yang dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi masalah migrasi besar-besaran. *Policy stream* mencakup gagasan, proposal, dan kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasi isu yang teridentifikasi dalam *problem stream*. Kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki merupakan salah satu solusi utama yang muncul dalam *policy stream*. Izin kerja memungkinkan pengungsi

untuk bekerja secara legal di pasar kerja formal, mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang sering kali penuh eksploitasi. Namun, kebijakan ini tidak hanya dirancang untuk melindungi pengungsi, tetapi juga mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat lokal, seperti persaingan kerja dan ketegangan sosial. Dengan kata lain, kebijakan ini mencerminkan pencarian solusi yang realistis dan dapat diterima oleh berbagai aktor yang terlibat.

Di sisi lain, organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), bersama dengan dukungan finansial Uni Eropa, memainkan peran penting sebagai *policy entrepreneurs* yang mendorong pengenalan dan implementasi solusi strategis untuk tantangan migrasi besar-besaran di Turki. ILO berkontribusi melalui pelatihan keterampilan yang dirancang untuk meningkatkan daya saing pengungsi di pasar kerja formal, sementara kursus bahasa yang mereka sediakan membantu mengatasi hambatan komunikasi, salah satu tantangan utama dalam proses integrasi ekonomi. Selain itu, UNHCR memperkuat kapasitas pengungsi dengan menyediakan bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan akses ke program integrasi lokal, sehingga pengungsi memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai kemandirian. Uni Eropa melengkapi inisiatif ini dengan memberikan dukungan finansial, termasuk melalui program *Emergency Social Safety Net* (ESSN), yang memberikan bantuan tunai langsung kepada pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan solusi konkret bagi masalah seperti pengangguran dan eksploitasi, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pengungsi berkontribusi secara

positif terhadap ekonomi lokal sambil mengurangi ketegangan sosial dengan masyarakat tuan rumah. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bagaimana sinergi antara aktor internasional dan nasional dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan kompleks terkait pengungsi.

2.3 *Political Stream*: Faktor Politik yang Memengaruhi Keputusan

Aliran politik (*political stream*) mencakup suasana nasional (*national mood*), kekuatan politik yang terorganisir, dan proses pembangunan konsensus. Suasana nasional mencerminkan opini publik dan dukungan sosial terhadap suatu kebijakan, sementara kekuatan politik melibatkan peran partai politik, kelompok penekan, dan dinamika legislatif. Proses pembangunan konsensus melibatkan negosiasi dan kompromi antara berbagai aktor politik untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Kingdon juga menekankan bahwa aliran politik sering kali menjadi pendorong utama dalam pembentukan agenda kebijakan, terutama ketika suasana politik mendukung tindakan tertentu (Kingdon 2014).

Sejak konflik Suriah pecah pada tahun 2011, Turki menerapkan kebijakan *Open Door Policy* yang membuka pintu bagi jutaan pengungsi Suriah untuk mencari perlindungan. Kebijakan ini pada awalnya dipandang sebagai langkah kemanusiaan yang didasarkan pada solidaritas terhadap sesama Muslim Sunni, serta sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap tetangga yang sedang dilanda krisis. Kebijakan ini juga dianggap sebagai upaya strategis pemerintah Turki untuk meningkatkan pengaruh dan reputasinya di kawasan Timur Tengah dan kancah internasional. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan, menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari

agenda politiknya untuk menegaskan posisi Turki sebagai kekuatan regional yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan global (Suryantama 2021, 67).

Namun, seiring waktu, kebijakan tersebut memunculkan berbagai tantangan yang memicu perdebatan politik domestik. Partai oposisi dan sebagian masyarakat Turki mengkhawatirkan dampak negatif dari kehadiran pengungsi Suriah, termasuk tekanan pada infrastruktur dan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang dinilai semakin kewalahan. Selain itu, pengungsi dianggap memicu peningkatan persaingan di pasar tenaga kerja, terutama di sektor informal, sehingga menurunkan upah dan meningkatkan angka pengangguran di kalangan pekerja lokal. Kekhawatiran lainnya adalah perubahan demografis di beberapa wilayah perbatasan yang dipandang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik dalam jangka panjang. Ketegangan ini mencerminkan bagaimana isu pengungsi menjadi topik yang sangat sensitif dalam politik domestik Turki, menguji kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan antara komitmen kemanusiaan dan kepentingan nasional (Suryantama 2021, 68).

Lebih lanjut, perubahan sistem pemerintahan Turki dari parlementer ke presidensial pada tahun 2018 membawa dampak signifikan terhadap dinamika kebijakan terkait pengungsi. Dengan kekuasaan eksekutif yang lebih terpusat, pemerintah di bawah Presiden Recep Tayyip Erdoğan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tanpa harus melalui proses panjang di parlemen. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam menangani krisis pengungsi, seperti penguatan pengawasan perbatasan dan penyediaan layanan dasar bagi pengungsi.

Namun, sentralisasi kekuasaan ini juga memunculkan kritik, terutama terkait kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Banyak pihak, termasuk kelompok oposisi, menilai bahwa kebijakan terkait pengungsi kurang melibatkan masukan dari masyarakat luas dan tidak mempertimbangkan secara memadai dampaknya terhadap komunitas lokal (Izzatinnisa, Yusra, and Jamilah 2022, 4).

Di sisi lain, dinamika politik domestik menunjukkan adanya penurunan dukungan terhadap Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dalam beberapa pemilihan terakhir. Penurunan ini sebagian besar mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam menangani isu pengungsi. Sentimen negatif terhadap pengungsi semakin menguat, dipicu oleh persepsi bahwa kehadiran mereka memberikan tekanan besar pada layanan publik, meningkatkan persaingan di pasar kerja, dan memicu perubahan sosial yang tidak diinginkan. Bahkan, insiden diskriminasi dan kekerasan yang menargetkan komunitas pengungsi Suriah semakin sering terjadi, mencerminkan meningkatnya intoleransi di masyarakat. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, yang harus menyeimbangkan antara menjaga komitmen kemanusiaan terhadap pengungsi dan meredakan ketegangan sosial serta politik di dalam negeri (Izzatinnisa, Yusra, and Jamilah 2022, 4).

Dalam pandangan yang lain, faktor keamanan menjadi salah satu elemen kunci dalam perdebatan kebijakan pengungsi di Turki. Kehadiran jutaan pengungsi Suriah di wilayah perbatasan menciptakan kekhawatiran akan kemungkinan infiltrasi kelompok militan, termasuk ancaman dari organisasi seperti ISIS atau kelompok ekstremis lainnya. Pemerintah Turki juga mengkhawatirkan bahwa

wilayah perbatasan yang tidak stabil dapat menjadi tempat penyelundupan senjata dan anggota militan. Selain itu, lonjakan jumlah pengungsi di wilayah perbatasan memperumit pengawasan dan kontrol keamanan, menciptakan tantangan tambahan bagi otoritas lokal dan militer Turki dalam menjaga stabilitas nasional. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antara pengungsi dan masyarakat lokal, tetapi juga memicu kritik dari partai oposisi yang menilai pemerintah gagal mengantisipasi risiko-risiko tersebut (Luerdi 2016, 43).

Tantangan keamanan juga diperparah oleh konflik dengan kelompok Kurdi di Suriah utara, yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah kelompok yang dicap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki. PKK telah lama menjadi ancaman keamanan bagi Turki, dan kehadiran pengungsi Suriah di dekat wilayah konflik semakin meningkatkan sensitivitas isu ini. Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah Turki meluncurkan beberapa operasi militer di wilayah perbatasan, seperti *Euphrates Shield Operation* dan *Peace Spring Operation*, dengan tujuan untuk menekan aktivitas PKK dan menciptakan zona aman bagi pengungsi. Meskipun langkah ini dianggap perlu dari sudut pandang keamanan nasional, operasi militer tersebut menambah kompleksitas perdebatan politik domestik. Banyak pihak mempertanyakan prioritas pemerintah antara menjaga keamanan, melindungi pengungsi, dan mengelola dampak sosial-politik yang timbul akibat langkah-langkah tersebut. Hal ini menciptakan dilema bagi pemerintah dalam menyeimbangkan keamanan nasional dengan komitmen kemanusiaan (Luerdi 2016, 36).

Lebih jauh, seiring berjalannya waktu, kehadiran jutaan pengungsi Suriah di Turki sejak 2011 telah membawa tantangan yang signifikan, terutama dalam tekanan pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wilayah perbatasan dan kota-kota besar seperti Istanbul dan Gaziantep menghadapi lonjakan permintaan akan layanan dasar, melebihi kapasitas yang tersedia. Dalam sektor pendidikan, misalnya, banyak sekolah yang kelebihan kapasitas akibat bertambahnya siswa dari kalangan pengungsi, sehingga mempengaruhi kualitas pengajaran bagi siswa lokal. Di sektor kesehatan, fasilitas medis menghadapi tekanan besar dengan meningkatnya jumlah pasien, sementara ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan sering kali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Ketegangan ini diperburuk oleh alokasi anggaran yang harus dibagi antara kebutuhan warga lokal dan pengungsi, menimbulkan kritik dari berbagai pihak terhadap pemerintah (Suryantama 2021, 67).

Selain tekanan pada layanan publik, persaingan di pasar tenaga kerja menjadi isu sensitif dalam perdebatan politik domestik. Pengungsi Suriah yang bekerja di sektor informal sering kali menerima upah rendah, menciptakan persaingan yang tidak adil dengan pekerja lokal. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa pengungsi "mengambil" pekerjaan dari penduduk lokal, terutama di sektor keterampilan rendah seperti konstruksi, manufaktur, dan perdagangan kecil. Dampaknya, beberapa pekerja lokal merasa terpinggirkan, dan angka pengangguran di kalangan masyarakat Turki pun meningkat. Perdebatan ini menjadi salah satu isu utama yang dimanfaatkan oleh partai oposisi untuk menyerang kebijakan pemerintah, menggambarkan kebijakan pengungsi sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi negara (Suryantama 2021, 67).

Selain itu, meningkatnya sentimen xenofobia di kalangan masyarakat Turki semakin memperumit dinamika politik domestik. Kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi dari kehadiran pengungsi sering kali diekspresikan melalui prasangka dan intoleransi terhadap komunitas pengungsi. Insiden diskriminasi dan kekerasan yang menargetkan pengungsi Suriah, seperti pelecehan verbal, penyerangan fisik, dan perusakan properti, semakin sering dilaporkan. Sentimen ini diperburuk oleh media lokal yang kadang-kadang menyebarkan narasi negatif tentang pengungsi, seperti mengaitkan mereka dengan meningkatnya angka kriminalitas atau beban ekonomi. Intoleransi ini tidak hanya mempersulit proses integrasi pengungsi ke dalam masyarakat Turki tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang berpotensi mengancam stabilitas jangka panjang (Izzatinnisa, Yusra, and Jamilah 2022, 6).

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Turki menghadapi dilema yang kompleks. Di satu sisi, komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional mendorong pemerintah untuk terus mendukung pengungsi melalui kebijakan inklusif. Namun, disisi lain, tekanan domestik dari partai oposisi dan masyarakat lokal memaksa pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menangani kekhawatiran publik. Beberapa langkah telah diambil, seperti memperketat pengawasan terhadap pengungsi di sektor informal dan meningkatkan program integrasi sosial. Namun, tantangan untuk mencapai keseimbangan antara komitmen kemanusiaan dan respons terhadap tekanan domestik tetap menjadi ujian berat bagi kebijakan pengungsi di Turki. Situasi ini mencerminkan bagaimana isu pengungsi tidak hanya

menjadi tantangan sosial tetapi juga menjadi medan pertempuran politik dalam negeri.

Terkait hubungan pemerintah Turki dan Uni Eropa, pada Maret 2016, Uni Eropa (UE) dan Turki mencapai kesepakatan penting yang dikenal sebagai *EU-Turkey Statement*, sebuah upaya strategis untuk mengatasi krisis migrasi yang mencapai puncaknya pada tahun 2015. Kesepakatan ini dirancang untuk mengendalikan arus migrasi tidak teratur yang membanjiri Eropa melalui jalur Laut Aegea. Dalam perjanjian tersebut, migran yang memasuki Yunani secara ilegal dari Turki akan dikembalikan ke Turki, sementara untuk setiap migran yang dipulangkan, UE berkomitmen menerima seorang pengungsi Suriah secara legal dari Turki. Skema ini tidak hanya bertujuan untuk menekan jumlah migrasi ilegal tetapi juga memastikan jalur yang lebih aman dan teratur bagi para pengungsi yang mencari perlindungan di Eropa. Dengan demikian, kesepakatan ini berfungsi sebagai alat pengaturan migrasi sambil mempromosikan mekanisme berbagi tanggung jawab antara Turki dan negara-negara anggota UE (Kurniawan 2019, 7).

Sebagai imbalannya, UE menawarkan sejumlah insentif kepada Turki untuk mendukung implementasi kesepakatan tersebut. Salah satu komitmen utama UE adalah memberikan bantuan finansial untuk mendukung pengungsi Suriah yang tinggal di Turki. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program, termasuk pendidikan, kesehatan, dan integrasi sosial, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi dan mengurangi tekanan ekonomi pada pemerintah Turki. Selain itu, UE berjanji mempercepat liberalisasi visa bagi warga negara Turki, memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke negara-negara UE tanpa

memerlukan visa untuk kunjungan jangka pendek. Komitmen lainnya adalah menghidupkan kembali pembicaraan mengenai akses Turki ke UE, sebuah proses yang telah terhenti selama bertahun-tahun. Namun, meskipun insentif ini menarik, realisasinya berjalan lambat, memicu frustrasi di pihak Turki yang merasa bahwa komitmen UE tidak sepenuhnya dipenuhi (Kurniawan 2019, 8).

Kesepakatan ini membawa dampak yang signifikan baik secara politik maupun ekonomi, namun juga menghadapi kritik dari berbagai pihak. Di Turki, kesepakatan ini dianggap memberikan tekanan tambahan pada pemerintah untuk mengelola populasi pengungsi yang besar sambil menghadapi tuntutan domestik untuk membatasi kehadiran pengungsi. Banyak pihak di Turki melihat perjanjian ini sebagai upaya UE untuk "*outsourcing*" krisis migrasi dengan memanfaatkan Turki sebagai penghalang utama bagi arus migrasi ke Eropa. Sementara itu, di sisi UE, kesepakatan ini juga menghadapi kritik dari organisasi hak asasi manusia yang menilai pengembalian migran ke Turki sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan pengungsi internasional. Terlepas dari tantangan dan kontroversi yang dihadapi, *EU-Turkey Statement* tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam kerja sama migrasi antara Turki dan UE, sekaligus mencerminkan kompleksitas hubungan geopolitik antara kedua pihak (Kurniawan 2019, 8).

Namun, salah satu aspek yang menimbulkan kekecewaan besar bagi Turki adalah stagnasi dalam proses akses ke Uni Eropa. Meskipun kesepakatan migrasi 2016 awalnya memberikan harapan bahwa pembicaraan akses akan kembali dihidupkan, kenyataannya dialog politik antara Turki dan UE tetap tidak

berkembang. Beberapa negara anggota UE, seperti Prancis dan Jerman, menunjukkan sikap skeptis terhadap integrasi Turki ke dalam blok Eropa, seringkali dengan alasan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya demokrasi di Turki. Hal ini memperkuat narasi di Turki bahwa kesepakatan migrasi lebih menguntungkan UE dibandingkan Turki, menambah ketegangan dalam hubungan bilateral (Kurniawan 2019, 8).

Di sisi lain, Uni Eropa menghadapi kritik dari berbagai organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia karena dianggap terlalu bergantung pada Turki untuk menahan arus migrasi ke Eropa. Beberapa pihak menyebut bahwa pendekatan ini mengabaikan nilai-nilai fundamental UE terkait perlindungan pengungsi. Mengembalikan migran ke Turki seringkali dipandang tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan mengembalikan pencari suaka ke tempat di mana mereka mungkin menghadapi ancaman. Kondisi pengungsi di kamp-kamp Turki juga menjadi perhatian, karena meskipun dana dari UE telah membantu meningkatkan fasilitas, tantangan seperti over kapasitas dan akses terbatas terhadap layanan masih menjadi masalah.

Kesepakatan migrasi 2016 juga mempengaruhi kebijakan domestik Turki, khususnya dalam pengelolaan pengungsi. Pemerintah Turki meningkatkan pengawasan perbatasan untuk mencegah migrasi ilegal, termasuk membangun pagar pembatas dan memperkuat pasukan keamanan. Selain itu, dana dari UE digunakan untuk memperbaiki layanan dasar bagi pengungsi, seperti penyediaan tempat tinggal yang layak dan akses ke pendidikan serta kesehatan. Namun, langkah ini juga memicu kritik dari oposisi domestik, yang menuduh pemerintah

terlalu fokus pada pengungsi dan mengabaikan kebutuhan warga lokal. Sentimen ini menambah ketegangan politik di dalam negeri, dengan masyarakat lokal sering kali merasa bahwa pengungsi mendapat prioritas lebih tinggi.

Partai oposisi di Turki, seperti Partai Rakyat Republik (CHP), menggunakan isu pengungsi sebagai alat untuk menyerang pemerintah. Mereka mengkritisi kesepakatan ini dengan menyatakan bahwa Turki telah menjadi "penjaga gerbang" Eropa tanpa mendapatkan imbalan yang sepadan. Kritik ini mencerminkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tekanan besar akibat jumlah pengungsi yang tinggi. Selain itu, insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap pengungsi semakin meningkat, yang mencerminkan adanya resistensi sosial terhadap keberadaan pengungsi di kalangan masyarakat lokal.

Di sisi lain, kesepakatan migrasi ini telah berhasil mengurangi arus migrasi ilegal ke Eropa. Statistik menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah migran yang melintasi Laut Aegea setelah kesepakatan diberlakukan. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari tantangan, termasuk sulitnya memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan perjanjian. Turki sering kali merasa bahwa beban krisis migrasi tidak terbagi secara adil, sementara UE menghadapi kritik atas pelaksanaannya yang dianggap tidak transparan dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, *EU-Turkey Statement* tahun 2016 menggambarkan hubungan kompleks antara Turki dan Uni Eropa. Kesepakatan ini menunjukkan bagaimana krisis migrasi dapat menjadi katalisator untuk kerja sama, tetapi juga

memunculkan ketegangan yang mendalam. Untuk menciptakan hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan, kedua pihak perlu memperkuat dialog dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai bersama, termasuk pembagian tanggung jawab yang lebih adil dalam menangani pengungsi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kesepakatan sangat penting untuk mengatasi kritik dan memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat bagi pengungsi, Turki, dan UE secara keseluruhan.

Dalam perspektif *politic stream* yang dikemukakan oleh John W. Kingdon, kesepakatan *EU-Turkey Statement* tahun 2016 dapat dilihat sebagai respons terhadap tekanan politik dan dinamika kekuasaan yang memengaruhi kedua pihak, baik Uni Eropa maupun Turki. *Politic stream* berfokus pada faktor-faktor politik, seperti pendapat publik, kelompok kepentingan, dan perubahan dalam komposisi pemerintahan, yang dapat membuka jendela peluang untuk mengusulkan atau menerapkan kebijakan tertentu. Dalam kasus ini, meningkatnya krisis migrasi pada tahun 2015 menciptakan urgensi politik di Eropa untuk mengendalikan arus migrasi. Uni Eropa menghadapi tekanan domestik yang besar dari negara-negara anggota, di mana partai-partai politik populis menggunakan isu migrasi untuk menggali dukungan dan menentang kebijakan migrasi yang lebih longgar. Dalam konteks ini, kesepakatan dengan Turki muncul sebagai solusi politik yang pragmatis untuk meredakan ketegangan di antara negara-negara anggota UE.

Di sisi Turki, kesepakatan ini menjadi alat untuk memperkuat posisi politik domestik dan internasional pemerintah. Presiden Recep Tayyip Erdoğan menggunakan kesepakatan ini sebagai bukti kemampuan pemerintahnya untuk

memainkan peran penting dalam urusan internasional dan menunjukkan bahwa Turki adalah mitra strategis yang tak tergantikan bagi Eropa. Pada saat yang sama, pemerintah Turki menghadapi kritik domestik terkait penanganan pengungsi Suriah, dengan partai oposisi dan masyarakat lokal mengkhawatirkan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan dari kebijakan terbuka terhadap pengungsi. Kesepakatan ini memberikan pemerintah alat politik untuk merespons kritik tersebut, dengan menunjukkan bahwa bantuan finansial dari Uni Eropa dapat digunakan untuk meringankan tekanan domestik yang diakibatkan oleh kehadiran pengungsi.

Selain itu, *political stream* juga mencerminkan bagaimana kesepakatan ini menyesuaikan dengan kepentingan politik domestik dari kedua pihak. Di Uni Eropa, kesepakatan ini memungkinkan negara-negara anggota untuk menghindari tekanan politik domestik dengan mengalihkan sebagian besar beban migrasi ke Turki. Bagi Turki, janji liberalisasi visa dan pembicaraan akses menjadi alat untuk menggalang dukungan domestik, meskipun implementasinya berjalan lambat. Namun, dalam praktiknya, ketidaksesuaian janji-janji tertentu, seperti liberalisasi visa, menimbulkan kekecewaan di pihak Turki, yang merasa bahwa Eropa hanya memanfaatkan Turki sebagai "penjaga gerbang" untuk mengendalikan migrasi tanpa memberikan keuntungan yang seimbang.

Kesepakatan ini juga memperlihatkan bagaimana tekanan politik domestik dapat menciptakan ketegangan dalam implementasinya. Di Turki, partai-partai oposisi menggunakan isu kesepakatan ini untuk menyerang pemerintah, dengan menuduhnya mengorbankan kepentingan nasional demi menjaga hubungan dengan

Uni Eropa. Sementara itu, di Uni Eropa, partai-partai populis dan kelompok hak asasi manusia mengkritik pendekatan tersebut karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai Eropa. Dalam konteks *political stream*, *EU-Turkey Statement* menunjukkan bagaimana kebijakan migrasi dapat menjadi medan pertempuran politik yang dipengaruhi oleh berbagai aktor dan kepentingan, baik domestik maupun internasional, dan bagaimana tekanan politik dapat memengaruhi desain, implementasi, dan keberlanjutan kebijakan tersebut.

2.3.1 *National Mood*

National Mood atau suasana nasional mencerminkan sikap masyarakat terhadap suatu isu, yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk dalam konteks pengungsi Suriah di Turki. Pada awal kedatangan pengungsi Suriah, Turki menyambut mereka dengan solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Solidaritas ini didorong oleh nilai-nilai bersama antara masyarakat Turki dan pengungsi Suriah, yang sebagian besar berlandaskan pada agama dan budaya yang serupa. Turki, sebagai negara mayoritas Muslim, merasakan rasa empati terhadap penderitaan pengungsi Suriah yang melarikan diri dari konflik di negara mereka. Sikap kemanusiaan ini diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang awalnya mendukung pengungsi dengan menyediakan tempat penampungan, layanan dasar, dan berbagai fasilitas lainnya. Masyarakat, terutama di awal krisis, cenderung menerima kehadiran pengungsi sebagai bagian dari upaya untuk menjaga citra negara sebagai pemimpin dalam solidaritas kemanusiaan di Kawasan (Syukran and Ubaidullah 2019).

Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya

pengungsi yang datang, perubahan suasana nasional mulai terjadi, terutama akibat ketegangan sosial dan ekonomi yang meningkat. Kekhawatiran mulai muncul mengenai persaingan pekerjaan, dengan banyak pengungsi yang berusaha memasuki pasar tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Xenofobia mulai berkembang di kalangan sebagian masyarakat, yang merasa bahwa pengungsi Suriah memberikan beban tambahan pada sumber daya yang sudah terbatas, seperti pekerjaan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal. Di beberapa daerah dengan konsentrasi pengungsi yang tinggi, ada ketegangan sosial yang meningkat, yang memengaruhi opini publik. Rasa ketidakpuasan ini tercermin dalam protes-protes lokal dan meningkatnya polarisasi terhadap kebijakan pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat ini menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan politik terkait kebijakan pengungsi, termasuk kebijakan izin kerja, yang dirumuskan untuk meredakan ketegangan tersebut dengan memberikan pengungsi akses resmi ke pasar tenaga kerja, sekaligus mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial (Syafitri, 2017).

Perubahan dalam sentimen nasional Turki menggambarkan bagaimana opini publik dapat secara tegas mengarahkan kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang pengelolaan pengungsi. Meskipun pada awalnya masyarakat merasakan empati kolektif yang berakar pada ikatan budaya yang sama, suasana masyarakat secara bertahap berubah ketika tekanan ekonomi yang berkepanjangan dan persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan pekerjaan mulai

membentuk perspektif yang berbeda. Evolusi ini telah memaksa para pembuat kebijakan untuk mengadopsi langkah-langkah yang tidak hanya membatasi pergerakan dan akses pengungsi tetapi juga mendorong pemulangan atau repatriasi, yang mencerminkan upaya untuk mengurangi beban domestik yang dirasakan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara cita-cita kemanusiaan dan sistem pemerintahan yang pragmatis.

2.3.2 Organized Political Forces

Peran *Organized Political Forces*, terutama partai politik dan kelompok kepentingan, sangat besar dalam menentukan arah kebijakan yang diambil pemerintah Turki dalam menangani krisis pengungsi Suriah. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan, memiliki pendekatan yang lebih kemanusiaan dan mendukung integrasi pengungsi Suriah ke dalam pasar tenaga kerja formal sebagai bagian dari agenda besar mereka untuk memperbaiki citra internasional Turki. AKP berpendapat bahwa memberikan pengungsi akses resmi ke pekerjaan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan luar negeri, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Turki. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menanggulangi potensi ketegangan sosial dengan memberikan kesempatan kepada pengungsi untuk berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat, daripada terjebak dalam sektor informal yang rentan terhadap eksploitasi.

Namun, Partai Rakyat Republik (CHP) yang merupakan partai oposisi utama, memiliki pandangan yang lebih skeptis terhadap

kebijakan ini. CHP berfokus pada dampak ekonomi dari kebijakan yang membuka kesempatan kerja bagi pengungsi, yang mereka khawatirkan dapat memperburuk tingkat pengangguran di kalangan warga Turki. Dalam pandangan CHP, penyerbuan pengungsi ke pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, yang menghadapi ketegangan sosial dan persaingan pekerjaan. CHP juga mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut akan memicu ketegangan sosial yang lebih besar, mengingat beberapa kelompok masyarakat sudah mulai menunjukkan rasa tidak puas terhadap kebijakan pengungsi pemerintah. Perbedaan pandangan antara AKP dan CHP ini menciptakan dinamika politik yang kompleks, di mana kebijakan pengungsi, termasuk izin kerja, harus diakomodasi agar dapat diterima oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan politik yang berbeda (Izzatinnisa, Yusra, and Jamilah, 2022).

Organized political force di Turki memainkan peran yang penting dalam membentuk kebijakan pengungsi, sebagaimana tercermin dalam pendekatan yang sangat kontras antara AKP yang berkuasa dan CHP yang beroposisi. AKP telah memanfaatkan posisi politiknya untuk mempromosikan integrasi formal pengungsi Suriah sebagai tenaga kerja, dengan alasan bahwa langkah-langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan pengungsi pada bantuan kemanusiaan asing sekaligus meningkatkan citra Turki di mata dunia. Sebaliknya, CHP berpendapat bahwa membuka pasar tenaga kerja bagi para pengungsi berisiko meningkatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, yang dapat memperburuk pengangguran masyarakat lokal

dan membebani sumber daya ekonomi. Perbedaan ideologis ini menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara pertimbangan kemanusiaan dan prioritas ekonomi domestik, sehingga berdampak pada perdebatan politik yang lebih luas atas alokasi sumber daya dan identitas nasional.

2.3.3 *Bargaining*

Bargaining atau negosiasi antara Turki dan pemangku kepentingan internasional menjadi elemen penting dalam membentuk kebijakan pengungsi, terutama terkait izin kerja bagi pengungsi Suriah. Pada tahun 2016, Turki dan Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan €6 miliar sebagai bagian dari Kesepakatan Pengungsi antara Turki dan UE. Dalam negosiasi ini, UE memberikan dukungan finansial untuk membantu Turki menangani beban pengungsi, sementara Turki diharapkan untuk meningkatkan hak-hak pengungsi, termasuk memberikan mereka akses ke pasar tenaga kerja formal. Negosiasi ini bukan hanya soal uang, tetapi juga melibatkan komitmen Turki untuk memenuhi standar internasional mengenai hak-hak pengungsi, sementara Turki berusaha memastikan bahwa bantuan tersebut dapat memperkuat kebijakan domestik mereka tanpa menambah beban sosial-ekonomi yang berlebihan. Proses negosiasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pengungsi tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika domestik, tetapi juga oleh tekanan dan harapan internasional yang mengharuskan Turki untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif terhadap pengungsi (Asmorowati, *et all* 2022).

Namun, dalam negosiasi ini juga terdapat ketegangan antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Turki berusaha menjaga kedaulatannya dalam mengelola masalah pengungsi tanpa terlalu bergantung pada bantuan internasional, sementara UE berfokus pada perlindungan hak-hak pengungsi yang lebih kuat. Negosiasi yang panjang dan penuh tekanan ini akhirnya menghasilkan kesepakatan yang membawa beberapa perubahan signifikan dalam kebijakan pengungsi di Turki, termasuk pengaturan mengenai pemberian izin kerja untuk pengungsi. Namun, meskipun ada kesepakatan internasional, implementasi kebijakan ini tetap menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keberhasilan dalam integrasi pasar tenaga kerja dan bagaimana kebijakan tersebut diterima di tingkat domestik.

2.3.4 *Bandwagons*

Bandwagons mengacu pada kecenderungan aktor kebijakan untuk mengikuti tren kebijakan populer yang didukung oleh banyak pihak di tingkat domestik maupun internasional. Dalam konteks kebijakan pengungsi Suriah, dukungan internasional yang besar terhadap integrasi pengungsi dan pemberian izin kerja memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan ini di Turki. Organisasi internasional seperti UNHCR dan ILO telah lama mengadvokasi kebijakan yang memungkinkan pengungsi untuk bekerja secara sah dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan internasional. Dukungan ini datang dengan tekanan internasional agar Turki mengambil langkah-langkah yang lebih terbuka dalam hal hak-hak pengungsi, termasuk menyediakan akses kerja yang lebih formal dan terstruktur. Banyak negara Eropa dan lembaga internasional melihat

kebijakan ini sebagai langkah positif dalam menangani krisis pengungsi global dan memberikan model bagi negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa (Badalić 2023).

Namun, meskipun ada dukungan internasional yang luas, bandwagons ini juga membawa tantangan domestik. Kebijakan ini tidak selalu diterima dengan baik di kalangan masyarakat Turki, terutama mengingat kekhawatiran mengenai ketegangan sosial dan persaingan kerja yang semakin meningkat. Meskipun dunia internasional mendukung kebijakan ini sebagai solusi jangka panjang yang lebih baik untuk integrasi pengungsi, implementasi kebijakan tersebut di Turki tetap penuh tantangan. Sikap negatif terhadap pengungsi di tingkat domestik, yang dipicu oleh kekhawatiran tentang dampak ekonomi, menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan internasional yang kuat, penerimaan kebijakan ini di dalam negeri memerlukan upaya lebih lanjut dalam mengelola komunikasi kebijakan dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat jangka panjang dari integrasi pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja formal (Larasati, 2020).

BAB 3

KONVERGENSI ALIRAN DAN KEBIJAKAN IZIN KERJA 2016

3.1 Pengenalan Masalah dan *Window Policy*

Dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF) yang diperkenalkan oleh John W. Kingdon, perubahan kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sebagai hasil dari pertemuan tiga aliran utama: *problem stream* (arus masalah), *policy stream* (arus kebijakan), dan *political stream* (arus politik). Setiap aliran memiliki perannya masing-masing dalam membentuk agenda kebijakan. *Problem stream* mencerminkan isu yang menjadi perhatian publik dan pemerintah, yang dianggap membutuhkan solusi segera. *Policy stream* terdiri dari berbagai alternatif kebijakan yang diuji dan dipertimbangkan sebelum dipilih sebagai solusi yang layak. Sementara itu, *political stream* mencakup faktor-faktor politik seperti dukungan partai, opini publik, serta dinamika politik yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat diterima atau ditolak (Kingdon 2014).

Ketika ketiga aliran utama dalam *Multiple Streams Framework* (MSF), *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*, bertemu pada waktu yang tepat, terbentuklah apa yang disebut sebagai *window policy* atau jendela kebijakan. *Window policy* ini adalah momen krusial di mana peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendorong atau mengesahkan kebijakan baru menjadi sangat terbuka. John W. Kingdon menggambarkan *window policy* sebagai situasi unik yang tidak selalu tersedia, tetapi dapat muncul akibat tekanan eksternal, krisis, atau perubahan politik yang signifikan. Dalam konteks ini, keberadaan *window policy* memungkinkan masalah yang telah diidentifikasi dan solusi yang telah dikembangkan dapat

bertemu dengan dukungan politik yang memadai, sehingga menciptakan peluang untuk perubahan kebijakan yang substansial (Kingdon 2014).

Pada dasarnya, *window policy* muncul ketika isu tertentu mendapatkan perhatian luas baik dari publik maupun pembuat kebijakan, dan solusi kebijakan dianggap siap untuk diimplementasikan. Selain itu, dalam proses pembukaan *window policy*, peran *policy entrepreneur* menjadi sangat penting. *Policy entrepreneur* adalah individu atau kelompok yang aktif memanfaatkan momen tersebut untuk mendorong kebijakan baru. Mereka dapat berasal dari dalam pemerintahan, seperti birokrat, pejabat tinggi, atau politisi, maupun dari luar, seperti akademisi, organisasi internasional, atau kelompok advokasi. Namun, *window policy* tidak selalu terbuka dalam waktu yang lama. Kesempatan ini bersifat sementara dan dapat tertutup jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan *window policy*, tetapi juga pada kemampuan para *policy entrepreneur* untuk merancang solusi yang dapat diterima secara teknis, layak secara politik, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, *window policy* memainkan peran penting dalam menjembatani masalah, solusi, dan dukungan politik untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif (Hoefer 2022).

Dalam konteks krisis pengungsi Suriah di Turki, masalah ini menjadi perhatian utama karena dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sejak kebijakan "*Open Door Policy*" yang diterapkan oleh pemerintah Turki pada tahun 2016, hal ini kemudian memungkinkan arus masuk pengungsi dalam jumlah besar. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini

semakin dirasakan. Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mengalami tekanan yang signifikan akibat peningkatan jumlah pengguna. Selain itu, pasar tenaga kerja menghadapi persaingan yang semakin ketat antara penduduk lokal dan pengungsi, terutama di sektor informal. Perubahan demografis yang cepat juga menimbulkan tantangan dalam hal integrasi sosial dan budaya (Patnistik 2024).

Kehadiran pengungsi Suriah dalam jumlah besar telah memicu perdebatan politik yang intens di Turki. Partai-partai oposisi dan sebagian masyarakat mengkhawatirkan dampak negatif dari kebijakan tersebut. Isu pengungsi menjadi topik sensitif yang memecah belah opini publik. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa Turki memiliki kewajiban moral untuk membantu sesama Muslim yang terkena dampak konflik. Namun, ada juga yang merasa bahwa kehadiran pengungsi memberikan tekanan tambahan pada sumber daya negara dan dapat mengancam stabilitas sosial. Tekanan ekonomi akibat meningkatnya jumlah pengungsi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Turki harus mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk menyediakan layanan dasar bagi pengungsi, seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai distribusi sumber daya dan potensi pengurangan layanan bagi warga negara Turki sendiri. Selain itu, persaingan di pasar tenaga kerja, terutama di sektor informal, menyebabkan penurunan upah dan meningkatnya tingkat pengangguran di kalangan pekerja lokal (Patnistik 2024).

Dari perspektif politik, isu pengungsi Suriah telah menjadi alat bagi berbagai pihak untuk memajukan agenda politik mereka. Kebijakan "*Open Door Policy*" yang diterapkan oleh Turki didukung penuh oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan. AKP

menjadikan kebijakan ini sebagai bagian integral dari agenda politiknya untuk menegaskan posisi Turki sebagai kekuatan regional yang peduli terhadap isu-isu kemanusiaan global. Erdoğan menekankan bahwa menerima pengungsi Suriah adalah kewajiban moral dan sosial bagi Turki, terutama karena kesamaan identitas sebagai sesama Muslim. Dukungan politik yang kuat dari AKP dan pemerintah memungkinkan implementasi kebijakan ini berjalan relatif lancar. Pemerintah Turki telah mengambil berbagai langkah untuk mengelola dampak dari kebijakan ini, termasuk mendirikan kamp-kamp pengungsi di beberapa provinsi dan memberikan akses layanan dasar bagi para pengungsi. Selain itu, pada Januari 2016, Kementerian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial Turki mengeluarkan regulasi yang memberikan izin kerja bagi pengungsi Suriah, dengan tujuan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mengurangi tekanan di pasar tenaga kerja informal (Syukran & Ubaidullah 2019, 14).

Lebih lanjut, setelah menerapkan kebijakan *open door policy*, Turki menerima arus masuk jutaan pengungsi Suriah sejak konflik di Suriah meletus pada tahun 2011. Kebijakan ini, meskipun didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, menimbulkan tekanan signifikan pada berbagai sektor di Turki. Layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan permintaan yang drastis, sementara pasar tenaga kerja menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selain itu, stabilitas sosial turut terpengaruh dengan adanya perubahan demografis yang cepat dan tantangan integrasi budaya antara pengungsi dan masyarakat lokal (Syukran and Ubaidullah 2019).

Menyadari kompleksitas tantangan tersebut, pemerintah Turki mengambil langkah proaktif untuk mengelola situasi ini. Salah satunya adalah dengan

membangun kamp-kamp pengungsian yang tersebar di beberapa provinsi, terutama di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan Suriah. Kamp-kamp ini dirancang untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi para pengungsi. Namun, seiring berjalannya waktu, kapasitas kamp-kamp ini mulai terlampaui akibat terus bertambahnya jumlah pengungsi, sehingga banyak dari mereka yang memilih menetap di luar kamp dan berbaur dengan masyarakat lokal. Selain upaya domestik, Turki juga menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk mengatasi tantangan yang ada. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan berbagai LSM internasional berperan dalam memberikan bantuan teknis dan finansial. Bantuan ini mencakup program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial bagi pengungsi. Kerja sama ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi pengungsi ke dalam masyarakat Turki serta mengurangi beban yang ditanggung oleh pemerintah (Syafitri 2017, 12).

Berdasarkan penjabaran di atas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keberhasilan kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki merupakan contoh nyata bagaimana interaksi dinamis antara *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream* dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF). Dalam konteks ini, *problem stream* diwakili oleh krisis pengungsi yang menimbulkan tekanan signifikan pada layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, serta pasar tenaga kerja Turki. Situasi ini menciptakan urgensi bagi pemerintah untuk mencari solusi kebijakan yang dapat mengatasi tekanan ini secara efektif.

Terkait hal ini, *policy stream* mencakup pengembangan solusi kebijakan, seperti peraturan izin kerja, yang dirancang untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam perekonomian formal. Kebijakan ini menawarkan kerangka kerja legal yang bertujuan untuk mengurangi eksploitasi di sektor informal sekaligus mendorong kontribusi ekonomi dari pengungsi. Sementara itu, *political stream* melibatkan dinamika politik domestik dan internasional yang memengaruhi keputusan kebijakan. Dukungan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan Presiden Recep Tayyip Erdoğan menjadi faktor utama yang memungkinkan kebijakan ini diterapkan. Konvergensi ketiga arus ini, yang difasilitasi oleh tindakan strategis *policy entrepreneur*, memungkinkan terciptanya kebijakan yang efektif dalam merespons krisis tersebut (Izzatinnisa, Yusra, and Jamilah 2022, 2).

Namun, pengesahan kebijakan hanyalah langkah awal dalam proses kebijakan publik. Proses implementasi memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas pengungsi itu sendiri. Salah satu tantangan utama dalam implementasi ini adalah hambatan administratif yang sering kali menghambat pengungsi dalam mengakses izin kerja. Selain itu, kurangnya sumber daya, seperti kapasitas kelembagaan untuk memproses aplikasi izin kerja, menjadi kendala lain yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Di sisi lain, resistensi dari masyarakat lokal juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Banyak warga lokal yang khawatir akan dampak negatif kehadiran pengungsi, seperti meningkatnya persaingan di pasar kerja dan tekanan pada layanan publik. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan partisipatif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya dapat diimplementasikan secara efektif, tetapi juga

dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dialog terbuka antara pengungsi dan masyarakat lokal, serta inisiatif untuk mengurangi stereotip, dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Evaluasi berkelanjutan juga merupakan komponen krusial dalam memastikan efektivitas kebijakan. Proses evaluasi memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti menyederhanakan proses administratif atau menyediakan lebih banyak pelatihan keterampilan bagi pengungsi. Selain itu, evaluasi dapat membantu memahami sejauh mana kebijakan ini telah berhasil mengurangi eksploitasi di sektor informal dan mendorong partisipasi pengungsi di pasar kerja formal. Melalui evaluasi, pembuat kebijakan juga dapat menilai dampak kebijakan ini terhadap masyarakat tuan rumah dan pengungsi itu sendiri. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya tentang merancang solusi, tetapi juga tentang memastikan bahwa solusi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menciptakan dampak positif yang nyata.

3.2 Proses Pembuatan Keputusan

Dalam konteks perumusan kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki, pemerintah, terutama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), memegang peran sentral sebagai pemangku kepentingan utama. AKP, yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan, memandang kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat citra Turki di kancah internasional sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan. Selain itu, kebijakan ini

diposisikan sebagai jawaban atas krisis pengungsi yang memunculkan tekanan besar pada layanan publik dan pasar kerja di Turki. Dengan memberikan akses kerja legal kepada pengungsi, pemerintah bertujuan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam perekonomian formal dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan kemanusiaan. Pendekatan ini juga menjadi upaya AKP untuk memperbaiki posisi politiknya di dalam negeri dengan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki solusi yang sistematis terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara (Izzatinnisa, Yusra, and Jamilah 2022, 4).

Sebagai pemangku kepentingan utama, pemerintah juga menghadapi tantangan dari partai oposisi yang memandang kebijakan ini dengan skeptis. Partai-partai seperti Partai Rakyat Republik (CHP) mengkritik kebijakan izin kerja karena dianggap berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat lokal. Mereka menyoroti dampak persaingan di pasar kerja yang ditimbulkan oleh pengungsi, yang sering kali bersedia bekerja dengan upah lebih rendah dibandingkan pekerja lokal. Selain itu, oposisi menekankan bahwa masuknya pengungsi ke sektor formal dapat memengaruhi stabilitas pasar kerja secara keseluruhan, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi. Kritik ini menjadi tantangan politik yang signifikan bagi pemerintah AKP, yang harus menghadapi tekanan domestik sambil tetap memprioritaskan agenda politik dan komitmen internasionalnya terhadap perlindungan pengungsi. Dalam situasi ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara menjaga stabilitas ekonomi dan sosial domestik serta memenuhi tekanan internasional terkait pengelolaan pengungsi (Izzatinnisa, Yusra, and Jamilah 2022, 4).

Di sisi lain, dalam perumusan kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki, pemerintah, terutama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), juga dapat dikatakan sebagai *policy entrepreneur*. *Policy entrepreneur* merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan melalui advokasi serta inovasi guna menciptakan perubahan yang diinginkan. Mereka berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam proses kebijakan publik, dengan tujuan menggeser agenda kebijakan atau memperkenalkan kebijakan baru ke dalam sistem yang telah ada. Lebih lanjut, *policy entrepreneur* mencakup aktor-aktor dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Mereka adalah individu atau kelompok yang terdorong untuk menginvestasikan sumber daya mereka, baik berupa waktu, tenaga, maupun modal politik, guna memengaruhi hasil kebijakan yang mereka anggap strategis dan berdampak luas (Asmorowati, Schubert, and Ningrum 2022).

Sebagai *policy entrepreneur*, AKP memanfaatkan peluang politik dan sosial untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja formal. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tekanan pada layanan publik dan pasar kerja informal, tetapi juga untuk memperkuat citra Turki sebagai negara yang berkomitmen tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan di kancah internasional. Dengan memberikan akses kerja legal kepada pengungsi, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan kemanusiaan dan menunjukkan bahwa Turki memiliki solusi sistematis terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara.

Masyarakat lokal juga menjadi salah satu pemangku kepentingan yang memainkan peran penting dalam dinamika kebijakan izin kerja. Banyak dari

mereka memandang kebijakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya di daerah perkotaan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Kekhawatiran ini terutama muncul dari kelompok pekerja informal yang merasa bahwa pengungsi Suriah, yang sering kali bersedia menerima upah rendah dan bekerja dalam kondisi yang tidak ideal, akan memperburuk ketimpangan di pasar tenaga kerja. Selain itu, ada ketegangan sosial yang muncul akibat perbedaan budaya dan stereotip negatif terhadap pengungsi, yang semakin mempersulit integrasi mereka ke dalam masyarakat. Namun, meski banyak yang menentang kebijakan ini, terdapat pula sebagian masyarakat yang mendukung, terutama mereka yang melihat potensi kontribusi pengungsi terhadap ekonomi lokal di sektor-sektor tertentu (Badalić 2023, 6).

Di sisi lain, komunitas pengusaha memandang kebijakan ini dengan perspektif yang lebih pragmatis. Banyak pengusaha memandang pengungsi sebagai tenaga kerja potensial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan di sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, dan manufaktur. Kehadiran pengungsi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor yang kurang diminati oleh pekerja lokal. Namun, regulasi pemerintah yang menetapkan bahwa 90% tenaga kerja di sebuah perusahaan harus merupakan warga negara Turki menciptakan hambatan bagi pengusaha untuk mempekerjakan pengungsi secara legal. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja lokal, tetapi pada saat yang sama mengurangi insentif bagi pengusaha untuk sepenuhnya mematuhi aturan tersebut. Akibatnya, banyak pengusaha lebih memilih mempekerjakan pengungsi secara informal, yang justru memperburuk kondisi ketenagakerjaan secara keseluruhan (Makovsky 2019, 19).

Selain pemerintah, partai politik, dan masyarakat lokal, lembaga legislatif dan komunitas akademik juga memainkan peran penting dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ini. Lembaga legislatif menjadi arena utama untuk debat politik antara partai pemerintah dan oposisi, di mana masing-masing pihak memajukan argumen dan agenda politik mereka. Dalam hal ini, oposisi sering kali menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam implementasi kebijakan. Di sisi lain, komunitas akademik memberikan kontribusi berupa analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan izin kerja. Pendekatan berbasis bukti ini membantu memperkuat argumen pemerintah bahwa kebijakan ini tidak hanya relevan secara sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan dampak jangka panjang yang positif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah mencerminkan upaya kolaboratif yang kompleks namun penting dalam mengatasi salah satu tantangan migrasi terbesar di era modern (Suhartono 2017, 4).

Di sisi lain, organisasi internasional faktanya juga memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki. Salah satu aktor utama adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), yang telah bekerja sama dengan pemerintah Turki untuk memberikan bantuan teknis, advokasi, dan program yang mendukung pengungsi. Dalam konteks kebijakan izin kerja, UNHCR memastikan bahwa pengungsi tidak hanya mendapatkan hak kerja, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang kerja secara maksimal. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, termasuk pelatihan bahasa Turki yang menjadi prasyarat penting bagi pengungsi untuk

berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja lokal. Selain itu, UNHCR juga mendukung pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja formal di Turki, sehingga pengungsi dapat berkontribusi secara produktif dan tidak hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan (Suhartono 2017, 4).

International Labour Organization (ILO) juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung kebijakan izin kerja ini. Fokus utama ILO adalah meningkatkan keterampilan kerja pengungsi, memastikan mereka mendapatkan kondisi kerja yang layak, dan mendorong penghapusan pekerja anak di komunitas pengungsi. ILO berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pemerintah Turki, pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan yang inklusif. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh ILO adalah mengembangkan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor tertentu di Turki, seperti konstruksi, pertanian, dan manufaktur. Program ini dirancang untuk mengurangi ketegangan antara masyarakat lokal dan pengungsi dengan menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi kedua belah pihak (Larasati 2020, 201).

Selain memberikan pelatihan, UNHCR dan ILO juga berperan dalam memberikan advokasi terhadap hak-hak pengungsi di pasar kerja. Dalam hal ini, kedua organisasi tersebut bekerja sama untuk memastikan bahwa kebijakan izin kerja bagi pengungsi selaras dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia dan perlindungan pekerja. Advokasi ini mencakup peningkatan kesadaran pemerintah dan pengusaha lokal mengenai pentingnya memberikan akses kerja yang adil bagi pengungsi. ILO, misalnya, mendorong pengusaha untuk tidak hanya

melihat pengungsi sebagai tenaga kerja murah tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan bisnis mereka (Suhartono 2017)

Kehadiran organisasi internasional seperti UNHCR dan ILO juga membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi pengungsi dalam mengakses pasar kerja formal. Salah satu tantangan utama adalah hambatan administratif, di mana banyak pengungsi tidak memahami prosedur untuk mendapatkan izin kerja. Dalam hal ini, UNHCR menyediakan panduan dan layanan informasi untuk membantu pengungsi memahami kebijakan yang berlaku. ILO, di sisi lain, memberikan dukungan kepada pemerintah Turki dalam menyederhanakan prosedur administrasi, sehingga proses perizinan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan tingkat partisipasi pengungsi dalam pasar kerja formal tetapi juga memperkuat efektivitas kebijakan izin kerja secara keseluruhan (Badalić 2023, 3).

Meskipun upaya yang dilakukan oleh UNHCR dan ILO telah membawa dampak positif, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal resistensi masyarakat lokal terhadap kehadiran pengungsi. Oleh karena itu, kedua organisasi ini juga bekerja sama dengan pemerintah Turki untuk menciptakan program dialog dan integrasi sosial yang bertujuan mengurangi ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal. Program-program ini mencakup kampanye kesadaran masyarakat tentang kontribusi pengungsi terhadap ekonomi lokal serta manfaat jangka panjang dari integrasi yang berhasil. Dengan pendekatan kolaboratif ini, UNHCR dan ILO tidak hanya membantu pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan

yang layak tetapi juga mendukung pemerintah Turki dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Luerdi 2016, 43).

Dalam prosesnya, proses perumusan kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki adalah hasil dari negosiasi intensif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan komunitas internasional. Pemerintah Turki menghadapi tekanan domestik yang signifikan akibat meningkatnya jumlah pengungsi yang memberikan dampak pada pasar tenaga kerja, layanan publik, dan stabilitas sosial. Di sisi lain, Turki juga berada di bawah tekanan internasional, terutama dari Uni Eropa, yang melalui perjanjian migrasi 2016 menawarkan bantuan finansial sebesar €6 miliar untuk mendukung pengungsi di Turki. Uni Eropa menginginkan Turki untuk menahan arus migran yang masuk ke Eropa, yang memuncak pada tahun 2015 akibat krisis pengungsi Suriah (Kurniawan 2019, 8). Dalam konteks ini, kebijakan izin kerja tidak hanya dirancang untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam perekonomian formal, tetapi juga untuk meredakan tekanan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam perjalanannya, kebijakan ini menghadapi resistensi dari partai oposisi dan masyarakat lokal. Partai oposisi, seperti Partai Rakyat Republik (CHP), mengkritik kebijakan ini karena dianggap dapat memengaruhi stabilitas pasar kerja domestik. Mereka berpendapat bahwa masuknya pengungsi ke pasar kerja formal dapat meningkatkan persaingan tenaga kerja dan menekan upah pekerja lokal, terutama di sektor informal. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh masyarakat lokal yang merasa terancam oleh kehadiran pengungsi dalam jumlah besar. Untuk meredakan resistensi ini, pemerintah menetapkan kuota maksimal 10% bagi pengungsi Suriah di setiap perusahaan. Langkah ini dirancang untuk melindungi

pekerja lokal, memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses ke peluang kerja yang cukup (Makovsky 2019, 19).

Selain kuota, pemerintah Turki juga membatasi sektor-sektor tertentu di mana pengungsi dapat bekerja, seperti pertanian, konstruksi, dan manufaktur. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi tekanan di sektor yang lebih kompetitif tetapi juga untuk mengarahkan pengungsi ke sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Sebagai contoh, sektor pertanian sering kali menghadapi kekurangan tenaga kerja karena kurang diminati oleh pekerja lokal. Dengan memasukkan pengungsi ke sektor ini, pemerintah berharap dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja sambil meminimalkan potensi konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal. Kebijakan ini juga memungkinkan pengungsi untuk memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar sambil tetap menjaga keseimbangan di pasar kerja domestik (Badalič 2023, 3).

Di sisi lain, tekanan dari Uni Eropa juga memengaruhi bentuk dan implementasi kebijakan ini. Kesepakatan migrasi 2016 antara Uni Eropa dan Turki tidak hanya mencakup bantuan finansial, tetapi juga komitmen Turki untuk meningkatkan pengawasan perbatasan dan mencegah migrasi ilegal. Sebagai imbalannya, Uni Eropa berjanji untuk memberikan dukungan dalam bentuk program-program integrasi sosial dan ekonomi, termasuk penguatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan untuk pengungsi. Tekanan ini mendorong pemerintah Turki untuk mengadopsi kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk peraturan izin kerja, sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa mereka serius menangani krisis pengungsi dan memenuhi komitmen internasionalnya (Kurniawan 2019, 8).

Dari penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki mencerminkan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai pemangku kepentingan domestik dan internasional. Pemerintah Turki, khususnya di bawah kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), memanfaatkan kebijakan ini untuk memperkuat citra internasional mereka dan menampilkan Turki sebagai negara yang mampu menangani krisis pengungsi dengan pendekatan yang manusiawi. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya terletak pada proses perumusannya tetapi juga pada implementasi dan pemeliharaan keberlanjutan kebijakan. Hal ini melibatkan koordinasi yang erat antara pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang nyata bagi pengungsi tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan ekonomi di Turki.

3.3 Konten Undang – Undang Izin Kerja 2016

Pada Januari 2016, pemerintah Turki melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Keamanan Sosial mengambil langkah besar dengan mengesahkan kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah yang berada di bawah status perlindungan sementara. Keputusan ini merupakan respons terhadap meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik berkepanjangan di Suriah sejak 2011. Dalam beberapa tahun pertama setelah kedatangan mereka, pengungsi Suriah menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, terutama dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Sebagian besar dari mereka terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum, yang sering kali menyebabkan eksploitasi tenaga kerja. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam pasar tenaga kerja formal, mengurangi ketergantungan mereka

pada bantuan kemanusiaan, serta mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap perekonomian Turki (Makovsky 2019, 19).

Kebijakan izin kerja ini mencakup beberapa regulasi utama yang mengatur bagaimana pengungsi Suriah dapat bekerja secara legal di Turki. Salah satu ketentuan utama adalah pemberlakuan kuota tenaga kerja asing, yang membatasi jumlah pekerja pengungsi dalam suatu perusahaan tidak boleh melebihi 10% dari total tenaga kerja di perusahaan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan di pasar kerja dan menghindari ketimpangan antara pekerja lokal dan pengungsi. Banyak pekerja lokal di Turki khawatir bahwa keberadaan pengungsi akan memperburuk tingkat pengangguran dan menurunkan standar upah mereka, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan rendah (Carpio & Wagner 2015, 3).

Selain pembatasan jumlah tenaga kerja, kebijakan ini juga mengatur lokasi di mana pengungsi dapat bekerja. Mereka hanya diizinkan untuk bekerja di provinsi tempat mereka terdaftar sebagai penerima perlindungan sementara. Aturan ini bertujuan untuk menghindari kepadatan pengungsi di kota-kota besar seperti Istanbul, Izmir, dan Ankara yang sudah mengalami tekanan ekonomi akibat lonjakan populasi yang signifikan. Namun, bagi banyak pengungsi yang telah pindah ke kota-kota besar dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, aturan ini menjadi hambatan besar karena membatasi mobilitas mereka dalam mencari peluang kerja yang lebih menguntungkan (Badalić 2023, 6).

Dalam upaya menyeimbangkan antara integrasi pengungsi dan perlindungan tenaga kerja lokal, kebijakan ini juga membatasi sektor-sektor pekerjaan tertentu yang terbuka bagi pengungsi. Beberapa sektor yang diizinkan

meliputi pertanian, konstruksi, dan manufaktur, yang semuanya dikenal memiliki kebutuhan tenaga kerja yang tinggi tetapi kurang diminati oleh pekerja lokal. Kebijakan ini dirancang agar para pengungsi dapat mengisi kekosongan di sektor-sektor tersebut tanpa mengancam keberadaan pekerja lokal di industri lain yang lebih kompetitif. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, mengingat tidak semua pengungsi memiliki pengalaman atau keterampilan yang relevan dengan sektor-sektor tersebut, sehingga program pelatihan kerja menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan ini (Larasati 2020, 196).

Selain pembatasan sektor dan kuota tenaga kerja, pemerintah juga mewajibkan pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas pengajuan izin kerja bagi pengungsi yang mereka pekerjakan. Proses ini melibatkan berbagai tahap administratif, termasuk verifikasi dokumen dan pembayaran biaya administrasi. Awalnya, biaya yang dikenakan untuk memperoleh izin kerja sebesar 600 lira Turki, tetapi kemudian dikurangi menjadi 250 lira untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengungsi dan pemberi kerja. Meskipun biaya ini masih tergolong tinggi bagi sebagian pengungsi dan usaha kecil, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempermudah akses kerja legal bagi mereka yang membutuhkan (Makovsky 2019, 20).

Regulasi ini juga mengatur mengenai hak-hak tenaga kerja pengungsi, termasuk kepatuhan terhadap standar upah minimum serta akses terhadap jaminan sosial dan layanan kesehatan. Pemerintah Turki mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan pengungsi untuk memberikan perlakuan yang setara dengan pekerja lokal, termasuk pembayaran upah sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan adanya aturan ini, diharapkan eksploitasi tenaga kerja di sektor informal

dapat diminimalisasi dan pengungsi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang lebih layak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pemberi kerja yang lebih memilih mempekerjakan pengungsi secara informal untuk menghindari biaya tambahan yang ditetapkan dalam kebijakan ini (Carpio & Wagner 2015, 3).

Secara keseluruhan, kebijakan izin kerja pada tahun 2016 adalah respons strategis pemerintah Turki terhadap ancaman sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh krisis pengungsi Suriah. Kebijakan ini merefleksikan upaya Turki untuk mempertimbangkan komitmen kemanusiaan dengan pertimbangan ekonomi dan politik, sambil menyelesaikan kebutuhan pengungsi dan masyarakat lokal. Dengan memberikan kerangka hukum bagi kerja pengungsi, kebijakan ini bertujuan menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam mengelola krisis pengungsi.

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki tahun 2016 merupakan respons strategis terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks akibat masuknya jutaan pengungsi sejak 2011. Dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF), kebijakan ini muncul dari konvergensi *problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*. *Problem stream* diwakili oleh ketegangan sosial-ekonomi dan keterbatasan akses layanan bagi pengungsi, sementara *policy stream* berupa pengesahan Undang-Undang Izin Kerja sebagai solusi. *Political stream* melibatkan dukungan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) serta tekanan internasional, khususnya dari Uni Eropa, yang turut mempengaruhi kebijakan ini.

Undang-Undang Izin Kerja 2016 bertujuan untuk mengintegrasikan pengungsi ke dalam pasar kerja formal dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal. Kebijakan ini mencakup regulasi seperti kuota pekerja pengungsi sebesar 10% di setiap perusahaan, pembatasan geografis, serta pengaturan sektor kerja tertentu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa konvergensi ketiga arus dalam MSF dapat menghasilkan solusi efektif jika didukung oleh tindakan strategis *policy entrepreneur*. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada evaluasi berkelanjutan, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan adaptif, kebijakan ini dapat menjadi model bagi negara lain dalam menangani pengungsi secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi terkait kebijakan izin kerja bagi pengungsi Suriah di Turki menekankan pentingnya peningkatan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Pemerintah Turki perlu menyederhanakan prosedur administrasi izin kerja, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta menurunkan biaya administrasi agar lebih mudah diakses oleh pengungsi dan pemberi kerja. Sosialisasi kebijakan juga harus ditingkatkan melalui kampanye informasi di komunitas pengungsi dan kerja sama dengan NGO serta organisasi internasional seperti UNHCR dan ILO. Selain itu, penguatan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Turki sangat diperlukan. Program pelatihan bahasa Turki dan pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan harus menjadi prioritas, diikuti dengan dukungan terhadap pengembangan usaha kecil oleh pengungsi melalui akses permodalan dan insentif bisnis.

Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan meneliti implementasi kebijakan izin kerja ini secara lebih komprehensif di berbagai provinsi di Turki, guna memahami variasi tantangan di

setiap wilayah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menilai dampak jangka panjang dari kebijakan izin kerja terhadap integrasi sosial dan ekonomi pengungsi Suriah. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam bersama pengungsi, pemberi kerja, dan masyarakat lokal dapat memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai efektivitas kebijakan. Studi lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi peran organisasi internasional secara lebih rinci, khususnya dalam membantu pemerintah Turki menghadapi hambatan implementasi dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung integrasi pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. 1998. "Mengenal Keragaman Paradigma Dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra" 1 (26).
- Asmorowati, Sulikah, Violeta Schubert, and Ayu Puspita Ningrum. 2022. "Policy Capacity, Local Autonomy, and Human Agency: Tensions in the Intergovernmental Coordination in Indonesia's Social Welfare Response amid the COVID-19 Pandemic." *Journal of Asian Public Policy* 15 (2): 213–27. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1869142>.
- Badalič, Vasja. 2023. "Trapped in the Underground Economy: Syrian Refugees in the Informal Labour Market in Turkey." *Third World Quarterly* 44 (5): 967–84. <https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2170224>.
- Carpio, Ximena V Del, and Mathis Wagner. 2015. "The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Labor Market." <http://econ.worldbank.org>.
- Fahham, A Muchaddam, and A M Kartaatmaja. 2014. "Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya." www.dw.de.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. First Edition. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hasly, M. H. (2024). KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI ATAS PEMBERLAKUAN VISA TERHADAP PENGUNGSI SURIAH. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(7), 2746-2756.
- Hoefer, Richard. 2022. "The Multiple Streams Framework: Understanding and Applying the Problems, Policies, and Politics Approach." *Journal of Policy Practice and Research* 3 (1): 1–5. <https://doi.org/10.1007/s42972-022-00049-2>.
- İçduygu, Ahmet, and Doğu Şimşek. 2016. "Syrian Refugees In Turkey: Towards Integration Policies." *Turkish Policy Quarterly*, 59–69.
- International Crisis Group. 2018. "Turkey's Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions." Brussels.
- Izzatinnisa, Muhammad Yusra, and Maryam Jamilah. 2022. "Repatriasi Pengungsi Suriah: Perubahan Kebijakan Turki Dalam Merespon Krisis Pengungsi." *Politic, Humanities, Law, International Relations and Social (Palito)* 1 (1).
- Kingdon, John W. 2014. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Second Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- Kirişçi, Kemal. 2013. "Syrian Refugees in Turkey: The Limits of an Open Door Policy." The Brookings Institution. June 27, 2013. <https://www.brookings.edu/articles/syrian-refugees-in-turkey-the-limits-of-an-open-door-policy/>.
- Kurniawan, Hilmy Yusuf. 2019. "Dinamika Hubungan Kerjasama Antara Uni Eropa Dengan Turki Dalam Menangani Pengungsi Suriah (2016-2017)." Yogyakarta.
- Larasati, Dinda. 2020. "Peran ILO Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah Di Turki." *Indonesian Journal of International Relations* 4 (2): 187–221.
- Loft, Philip, Georgina Sturge, and Esme Kirk-Wade. 2023. "The Syrian Civil War: Timeline and Statistics."
- Luerdi. 2016. "Intervensi Turki Dalam Krisis Suriah (2011-2014)." *International Society* 3 (2): 33–50.

Makovsky, Alan. 2019. "Turkey's Refugee Dilemma Tiptoeing Toward Integration."

- Patnistik, Egidius. 2024. "Dilema Pengungsi Suriah Di Turkiye." Kompas. July 25, 2024.
<https://internasional.kompas.com/read/2024/07/25/154229870/dilema-pengungsi-suriah-di-turkiye?page=all>.
- Podraza, Andrzej. 2018. "Geopolitical and Strategic Causes and Implications of the Syrian Civil War and the Refugee Crisis."
- Suhartono, Bambang. 2017. "Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Turki Tahun 2011-2014." *Global & Policy*. Vol. 5.
<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224>.
- Suryantama, Muhammad Dary. 2021. "Turkey's Open-Door Policy for Syrian Refugees: Humanity Motive and Political Motive." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 2 (2): 62–70. <https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.24927>.
- Syafitri, Maisyita. 2017. "Upaya Pemerintah Turki Dalam Menanggulagi Pengungsi Dari Suriah Tahun 2014-2016." *JOM FISIP UNRI* 4 (2).
- Syukran, and Ubaidullah. 2019. "The Impact of Turkey Open Door Policy For Turkey Refugees On Turkey's National Interest In 2011-2016 (Case Study of Syrian Refugees in Turkey)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4 (4). www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- UNHCR. 2022. "Turkey Fact Sheet."
- UNHCR Turkey. n.d. "Refugees and Asylum Seekers in Türkiye." UN Refugee Agency. Accessed February 17, 2025. <https://www.unhcr.org/tr/en/kime-yardim-ediyoruz/refugees-and-asylum-seekers-tuerkiye>.
- Uni Eropa Reporter Koresponden. 2021. "Dukungan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Di Turki: Dewan Menyetujui Amandemen Anggaran UE 2021." *Europorter*, September.
<https://id.eureporter.co/world/turkey/2021/09/30/humanitarian-support-to-refugees-in-turkey-council-approves-a-2021-eu-budget-amendment/>.
- Turkish Medical Association. 2016. "Problems of Refugees in Camps." In *War, Migration, and Health Experience of Turkey*, edited by K. Vatansever.